



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI



2021

RENCANA KERJA (RENJA)

Jl. Jendral Ahmad Yani No.57 Banyuwangi
Telepon/ Fax. 0333 412343
Website : dpmptsp.banyuwangikab.go.id
email : dpmptsp@banyuwangikab.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Berkat Ridho Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021. Berkat kerja sama seluruh pegawai dan arahan pimpinan di Dinas Penanaman Modal dan (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan pengelolaan Program dan Kegiatan oleh seluruh pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun dalam rangka mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Dokumen Renja ini, bermanfaat bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dan pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi tentang Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 yang disusun ini dirasa belum sempurna, untuk itu perlu kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Demikian Renja ini disusun dan tidak lupa disampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin dengan semua pihak yang terkait.

Banyuwangi, Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. WAWAN YADMADI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710720 199101 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman atau acuan yang dipakai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi juga berisi tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Sebagaimana diketahui bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 perlu disusun. Hal ini mengingat bahwa RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 telah mengalami perubahan baik tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 5

tahun ke depan. Rencana Kerja Awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini juga diharapkan sudah mengakomodasi beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi di Tahun Anggaran 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nonom 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016- 2021
32. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
33. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintukabupaten Banyuwangi;
34. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
35. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021;
36. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, yaitu sebagai pedoman atau acuan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan guna tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 dan dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, yang telah mengalami perubahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, bab ini berisi gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang menggambarkan pengertian tentang proses penyusunan Rencana Kerja (Renja), keterkaitan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2016-2021, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banyuwangi, memuat peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, memuat penjelasan maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja dan susunan garis besar isi dokumen.
- BAB II** : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, yang mengacu pada Hasil Laporan Kinerja Tahunan atau Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

- BAB III** : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yaitu penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan hal-hal yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi serta Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
- BAB IV** : **Penutup**, bab ini berisi catatan penting yang mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tidak lanjut Rencana Kerja (Renja) akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi di Tahun Anggaran 2021.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2020

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Tribulan II Tahun 2020, dilihat berdasarkan realisasi anggaran tampak sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
 Sampai Dengan Tribulan II (Dua) Tahun 2020

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (RP.)	JUMLAH REALISASI ANGGARAN (RP.)	CAPAIAN (%)
I.	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2.962.453.000,-	1.058.921.885,-	35,74
	1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,-	12.238.560,-	48,95
	2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.453.000,-	44.253.705,-	35,00
	3) Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	423.000.000,-	176.250.000,-	41,67
	4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000,-	62.113.300,-	31,06
	5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000,-	74.665.000,-	49,78
	6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110.000.000,-	74.605.940,-	67,82
	7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,-	0,-	0,00
	8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.000.000,-	109.472.500,-	72,98
	9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	10.000.000,-	2.750.000,-	27,50
	10) Kegiatan Bahan Logistik Kantor	130.000.000,-	51.574.400,-	39,67
	11) Kegiatan Makanan dan Minuman	60.000.000,-	0,-	0,00
	12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	453.000.000,-	105.834.970,-	23,36
	13) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	200.000.000,-	8.000.000,-	4,00
	14) Kegiatan Pengadaan Mebelair	300.000.000,-	299.604.710,-	99,87
	15) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000,-	15.497.800,-	31,00
	16) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	75.000.000,-	22.061.000,-	29,41
	17) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	350.000.000,-	0,-	0,00
	Sub Kegiatan Konstruksi Paving Halaman Gedung Kantor (MPP)	350.000.000,-	0,-	0,00

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (RP.)	JUMLAH REALISASI ANGGARAN (RP.)	CAPAIAN (%)
II.	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,-	0,-	0,00
	1) Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	16.000.000,-	0,-	0,00
	2) Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	26.000.000,-	0,-	0,00
	3) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	18.000.000,-	0,-	0,00
	4) Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	90.000.000,-	0,-	0,00
III.	Program Pengembangan Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal	205.000.000,-	19.995.120,-	9,75
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	165.000.000,-	19.995.120,-	12,12
	2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal	40.000.000,-	0,-	0,00
IV.	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	373.000.000,-	0,-	0,00
	1) Kegiatan Penyusunan Profil Penanaman Modal	68.000.000,-	0,-	0,00
	2) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Penanaman Modal	55.000.000,-	0,-	0,00
	3) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	250.000.000,-	0,-	0,00
V.	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.518.960.000,-	1.040.293.000,-	23,02
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Survey Kepuasan Pelayanan Penanaman Modal	50.000.000,-	0,-	0,00
	2) Kegiatan Sinkronisasi Instrumen Perizinan	780.000.000,-	0,-	0,00
	3) Kegiatan Fasilitasi Layanan Publik Terpadu	3.688.960.000,-	1.040.293.000,-	28,20
JUMLAH SELURUHNYA		8.209.413.000,-	2.079.302.005,-	25,81

Jadi secara keseluruhan capaian kinerja realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi hanya sebesar 25,81% atau hanya mampu merealisasikan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 2.079.302.005,- (Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Lima Rupiah) dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.209.413.000,- (Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Kinerja realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 pada masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja realisasi anggaran terbesar terdapat pada Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi yaitu sebesar 35,74 % atau sebesar Rp. 1.058.921.885,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.962.453.000,-;

2. Capaian kinerja realisasi anggaran terbesar kedua terdapat pada Program Pelayanan Penanaman Modal yaitu sebesar 23,02 % atau sebesar Rp. 1.040.293.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.040.293.000,-;
3. Capaian kinerja realisasi anggaran terbesar ketiga terdapat pada Program Pengembangan Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal, yaitu sebesar 9,75 % atau sebesar Rp. 19.995.120,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 205.000.000,-;
4. Capaian kinerja realisasi anggaran paling rendah terdapat pada Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal yaitu sebesar 0% atau tidak ada sama sekali realisasi pada masing-masing program tersebut sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.

Adapun Capaian Kinerja pada masing-masing Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dapat dirinci sebagai berikut.

1. Capaian Kinerja Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, dengan Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yaitu sebesar 58,94 % dari target kinerja yang ditetapkan;
2. Capaian Kinerja Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun Tepat Waktu yaitu sebesar 68,42 % dari target kinerja yang ditetapkan;
3. Capaian Kinerja Program Pengembangan Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal, dengan Indikator Program yaitu:
 - a. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal sebesar 26,31 % dari target kinerja yang ditetapkan;
 - b. Persentase Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar 47,06 % dari target kinerja yang ditetapkan;
4. Capaian Kinerja Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal, dengan Indikator Jumlah Minat Penanaman Modal yaitu sebesar 67,67 % dari target kinerja yang ditetapkan
5. Capaian Kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan Indikator yaitu sebesar 61,40 % dari target kinerja yang ditetapkan.

Capaian Kinerja pada masing-masing Program dan Kegiatan sampai dengan Tribulan II Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tribulan II (Dua) Tahun 2020

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
I.	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	92,50 %	36,30 %	58,94%
	1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	6 Bulan	50,00
	2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	6 Bulan	50,00
	3) Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Jasa Perkantoran yang Disediakan	300 OB	124 OB	41,33
	4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Kantor yang Disediakan	74 Jenis	23 Jenis	31,08
	5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	185.576 Lembar	3.060 Lembar	1,65
	6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Jenis	25 Jenis	92,59
	7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Unit	30 Unit	136,36
	8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Jenis	30 Jenis	107,14
	9) Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan/ Surat Kabar yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100,00
	10) Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	6 Bulan	50,00
	11) Kegiatan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	3.159 Kotak	650 Kotak	20,57
	12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Fasilitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	6 Bulan	50,00
	13) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	10 Jenis	10 Jenis	100,00
	14) Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah Jenis Mebelair yang Diadakan	95 Buah	5 Jenis	5,26
	15) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara	13 Unit	10 Unit	76,92
	16) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	102 Unit	3 Unit	2,94
	17) Rehabilitasi Sedang/ Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	1 Unit	0	0,00
	Sub Kegiatan Konstruksi Paving Halaman Gedung Kantor (MPP)	Jumlah Lokasi Konstruksi Paving yang Diadakan	1 Lokasi	0	0,00

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
II.	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu	95,00 %	65,00 %	68,42
	1) Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00
	2) Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi dan Penyusunan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	2 Laporan	1 Laporan	50,00
	3) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	3 Laporan	2 Laporan	66,67
	4) Kegiatan Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	Jumlah Jenis Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	2 Jenis	0	0,00
III.	Program Pengembangan Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	95,00 %	25,00 %	26,31
		Persentase Penyampaian LKPM	17,00 %	8,00 %	47,06
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Modul Aplikasi Penanaman Modal yang Dipelihara dan Dikembangkan	1 Modul	0	0,00
	2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun	4 Laporan	0	0,00
IV.	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	Rp. 3 Trilyun	Rp. 2,03 Trilyun	67,67
	1) Kegiatan Penyusunan Profil Penanaman Modal	Jumlah Buku Profil Investasi yang Dicetak	1 Buku	0	0,00
	2) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Penanaman Modal yang Disusun	1 Dokumen	0	0,00
	3) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Kegiatan Pameran Investasi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	0	0,00
V.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kesesuaian Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP	95,00 %	58,33 %	61,40
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Survey yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
	2) Kegiatan Sinkronisasi Instrumen Perizinan	Jumlah Waktu Kegiatan Sinkronisasi yang Dilaksanakan	12 Bulan	3 Bulan	25,00
	3) Kegiatan Fasilitasi Layanan Publik Terpadu	Jumlah Waktu Fasilitasi Layanan Publik Terpadu yang Disediakan	12 Bulan	6 Bulan	50,00

2.1.2 Capaian Rencana Strategis (Renstra)

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi tersebut mendukung pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Misi Nomor 2 yang berbunyi ***“Optimalisasi Sumber Daya untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan.”***
2. Misi Nomor 3 yang berbunyi ***“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.”***

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Visi dan Misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dikerangkai dalam sebuah Tujuan dan Sasaran yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selama periode Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Dalam melaksanakan Misi yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai tujuan yang harus dicapai. Adapun Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Investasi yang Dapat Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik;

Adapun Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Pencapaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik.

Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Banyuwangi selama Tahun 2016-2021, dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

NO.	MISI	TUJUAN		SASARAN	
1.	Optimalisasi Sumber Daya untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	1	Meningkatkan Investasi yang Dapat Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah
2.	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik	2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran, Formulasi serta Target Indikator Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.4

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET INDIKATOR SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Investasi yang Dapat Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dalam Satu Tahun Anggaran	Rp. 1,75 Trilyun	Rp. 1,80 Trilyun	Rp. 1,85 Trilyun	Rp. 3,50 Trilyun	Rp. 4,00 Trilyun	Rp. 4,50 Trilyun
2.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD	Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan yang Diberikan oleh Aparatur	85,00 %	86,00%	87,00%	88,00%	89,00 %	90,00 %

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Target Indikator Sasaran Strategis untuk Tujuan Meningkatkan Investasi yang Dapat Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA Dan PMDN pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4,00 Trilyun, sedangkan Target Indikator Sasaran untuk Tujuan Meningkatkan

Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD sebesar 89,00 %.

Hasil Capaian Kinerja atas Tujuan (1) Tujuan Meningkatkan Investasi yang Dapat Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA Dan PMDN pada Tahun Anggaran 2020 dan Tujuan (2) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah
Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2020

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. Trilyun	3,50	3,91	111,71	4,00	2,03	50,75
Rata-Rata Capaian Kinerja					111,71			50,75

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Satrategis Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar 111,71 % atau Baik Sekali, sedangkan sampai dengan Tribulan II Tahun 2020 yaitu sebesar 50,75 %.

Tabel 2.6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik
Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2020

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD	%	88,00	89,00	102,30	89,00	91,01	102,25
Rata-Rata Capaian Kinerja					102,30			102,25

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik dengan Indikator Sasaran

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 102,30 % atau Baik Sekali, sedangkan sampai dengan Tribulan II Tahun 2020 sebesar 102,25 %.

Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi juga bisa diukur dari Capaian Realisasi Nilai Investasi terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun Capaian Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang tercatat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tribulan II Tahun 2020, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Realisasi Investasi di Kabupaten Banyuwangi
Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2020

NO.	JENIS INVESTASI	JUMLAH IZIN	REALISASI INVESTASI (RP)	PERSENTASE (%)	REALISASI TENAGA KERJA (ORANG)
1.	PMA	4	14.717.420.200,-	0,72	294
2.	PMDN	982	2.015.468.018.931,-	99,28	40.309
Jumlah		986	2.030.185.439.131,-	100,00	40.603

Keterangan: Rasio 1 Tenaga Kerja = 50 Juta

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Capaian Kinerja Realisasi Investasi di Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tribulan II Tahun Anggaran 2020, terdiri dari Nilai Realisasi Investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Nilai Realisasi Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Capaian Nilai Realisasi Investasi dari 4 izin PMA tercatat sebesar Rp. 14.717.420.200,- (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah) atau hanya sebesar 0,72 % dari Total Realisasi Nilai Investasi, sedangkan dari 982 izin PMDN Nilai Investasinya sebesar Rp. 2.015.468.018.931,- (Dua Trilyun Lima Belas Milyar Empat Ratus Juta Enam Puluh Delapan Juta Delapan Belas Ribu Sembilan Tratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 99,28 % dari Total Realisasi Nilai Investasi.

Jadi secara Keseluruhan Realisasi Nilai Investasi dari PMA dan PMDN di Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tribulan II Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.030.185.439.131,- (Dua Trilyun Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Apabila

diasumsikan bahwa 1 Orang Tenaga Kerja setara dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) maka nilai realisasi investasi di Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tahun II Tahun 2020 sebesar Rp. 2.030.185.439.131,- maka nilai investasi tersebut sebanding dengan 40.603 orang Tenaga Kerja, atau bisa diartikan bahwa realisasi nilai investasi tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40.603 orang Tenaga Kerja.

2.1.3 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, bahwa mulai tanggal 6 Oktober 2017 pelayanan penanaman modal (perizinan) diselenggarakan atau dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik secara terintegrasi dibawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Pada Tahun 2019 Mal Pelayanan Publik Banyuwangi telah menyelenggarakan pelayanan sebanyak 213 jenis pelayanan publik. Selain Mal Pelayanan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi tepat pada tanggal 22 April 2019 juga telah meresmikan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng dan pada Tanggal 19 Desember 2019 juga telah mengoperasikan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Rogojampi yang mampu melayani sebanyak 98 jenis pelayanan publik. Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng dan Kecamatan Rogojampi merupakan bentuk Mini Mal yang merupakan Unit Layanan Publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memberikan akses layanan publik dan mendekatkan layanan kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi sehingga memenuhi harapan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih cepat dan mudah.

Keberhasilan pelaksanaan urusan penanaman modal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi juga dapat dilihat dari jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan dalam 1 (satu) Tahun. Berdasarkan catatan diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tahun II Tahun 2020 yaitu sebanyak 4.187 dokumen. Selengkapny jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tahun II Tahun 2020, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10

Rekapitulasi Jumlah Dokumen Perizinan yang Diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH PEMOHON	
		2019	2020
1.	Izin Lokasi	0	0
2.	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	138	85
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.093	836
4.	Tanda Daftar perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB)	2.642	1822
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	580	413
6.	Izin Usaha Industri (TDI)	2	1
7.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Pasar Tradisional (IUP2T)/Toko Modern (IUTM)	0	3
8.	Izin Usaha Angkutan	0	0
9.	Izin Trayek / Izin Operasional	0	0
10.	Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas c/d	0	0
11.	Izin Puskesmas	29	1
12.	Izin mendirikan dan izin operasional klinik	23	17
13.	Izin Apotik	37	20
14.	Izin Praktek Bidan	344	260
15.	Izin Optik	3	1
16.	Izin Usaha Obat Hewan	0	0
17.	Izin Usaha Peternakan	0	0
18.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	152	56
19.	Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah	0	0
20.	Izin penyelenggaraan reklame	136	71
21.	Pembayaran Reklame	719	595
22.	Surat Izin Usaha Jasa Medik veteriner	0	0
23.	Izin Prinsip	0	0
24.	Izin Rumah Kost	0	0
25.	Izin Rumah Kost 10 Kamar	17	
26.	Surat Izin Paramedik Veteriner	0	0
27.	Izin Usaha Industri (IUI)	10	6
JUMLAH		6.925	4.187

Capaian Realisasi Retribusi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat sebagaimana tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11

Realisasi Retribusi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tribulan II Tahun 2020

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4.264.732.000,-	543.781.208,-	12,75
2.	Izin Trayek	18.493.000,-	120.000,-	0,65
Jumlah		4.283.225.000,-	543.901.208,-	13,40

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Capaian Realisasi Retribusi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tribulan II Tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Retribusi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 543.781.208,- dari target sebesar Rp. 4.264.732.000,- atau sebesar 12,75 %;
2. Capaian Realisasi Retribusi dari Izin Trayek sebesar Rp. 120.000,- dari target sebesar Rp. 18.493.000,- atau sebesar 0,65%.

Capaian realisasi retribusi yang tidak sampai 70,00 % dari target disebabkan antara lain:

1. Penetapan target retribusi yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran yang terlalu besar sehingga sulit untuk diwujudkan;
2. Nilai retribusi untuk semua obyek retribusi yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Retribusi perlu dinaikkan sebab sampai saat ini nilai retribusi tersebut terlalu kecil;
3. Pemungutan retribusi perlu dilakukan dengan peningkatan kerjasama di lapangan yang lebih terintegrasi antara petugas pemungut retribusi dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur pimpinan di wilayah;
4. Perlu dikembangkannya sistem retribusi berbasis Teknologi Informasi (TI) yang telah ada sehingga dapat membantu secara maksimal terhadap realisasi pemungutan retribusi dan mempermudah petugas pemungut di lapangan.
5. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Retribusi perlu dinaikkan sebab sampai saat ini nilai retribusi tersebut terlalu kecil;
6. Pemungutan retribusi perlu dilakukan dengan peningkatan kerjasama di lapangan yang lebih terintegrasi antara petugas pemungut retribusi dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur pimpinan di wilayah;

7. Perlu dikembangkannya sistem retribusi berbasis Teknologi Informasi (TI) yang telah ada sehingga dapat membantu secara maksimal terhadap realisasi pemungutan retribusi dan mempermudah petugas pemungut di lapangan.

2.1.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

1. Perlu peningkatan optimalisasi pengetahuan dan keterampilan SDM pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
2. Kurang tersosialisasinya peraturan di bidang perizinan dan non perizinan serta penanaman modal secara masif atas regulasi yang begitu cepat berubah;
3. Belum terintegrasinya standar pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
4. Belum optimalnya implementasi atas tersusunnya regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
5. Belum terbentuknya tim fasilitas percepatan dari pengembangan kawasan industri terpadu;
6. Belum Optimalnya Implementasi Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Komunikasi, Koordinasi dan Sinkronisasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
2. Implementasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pedoman penyelenggaraan PTSP;
3. Pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia/ petugas pelayanan yang masih belum optimal terutama kompetensi terkait dengan pelayanan berbasis teknologi informasi;

4. Masih belum dibentuknya tim di Tingkat Kabupaten untuk mendorong percepatan pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi;
5. Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi.

Beberapa solusi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut, antara lain

1. Membangun kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan cara melakukan pertemuan secara berkala dan berkelanjutan;
2. Melakukan penyempurnaan mulai dari aspek kelembagaan, SDM dan mekanisme pelayanan, Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mengirim pegawai untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis tentang sistem pelayanan berbasis teknologi informasi;
4. Memberikan telaahan staf terkait pentingnya dibentuknya tim percepatan pengelolaan kawasan industri di Banyuwangi;
5. Segera mengusulkan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi.

2.1.5 Review Terhadap RKPD

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan **Visi** Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia.”*** Sedangkan **Misi** Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yakni:

1. Misi Nomor 2 yang berbunyi ***“Optimalisasi Sumber Daya untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan.”***

2. Misi Nomor 3 yang berbunyi “*Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.*”

Berdasarkan telaahan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di atas maka Sasaran Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berhubungan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Sasaran Strategis Bertambahnya Nilai Investasi dengan Indikator Sasaran yaitu Pertumbuhan Nilai Investasi;
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Indikator Sasaran Indeks Reformasi Birokrasi

Selanjutnya seluruh pengelolaan Program dan Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi diarahkan pada penyelesaian Permasalahan Isu-Isu Strategis tersebut. Sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) penunjang pada RKPD Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2020 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN);
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM PD).

Adapun Capaian Indikator Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2020 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 khusus Bidang Urusan Penanaman Modal, sebagai berikut.

Tabel 2.12
 Capaian Indikator RKPD Tahun 2020 (RPJMD Tahun 2016-2020)
 Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2020

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR TAHUN 2020		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Penanaman Modal						
1.	Program Pengembangan Data Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	95,00	25,00	26,31
		Persentase Penyampaian LKPM	%	17,00	8,00	47,06
2.	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	Rp. Trilyun	3,00	2,03	67,67
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kesuaian Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP	%	95,00	58,33	61,40

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Capaian Indikator RKPD Tahun 2019 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yang memiliki kewenangan atas urusan penanaman modal yakni:

1. Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Data Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal, dengan indikator yaitu :
 - a. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal sebesar 26,31 %;
 - b. Persentase Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar 8,00 %;
2. Capaian Indikator Kinerja Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal, dengan indikator Jumlah Minat Penanaman Modal sebesar Rp. 3,02 Trilyun; atau Masih sebesar 67,67%;
3. Capaian Indikator Kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan Indikator Persentase Kesuaian Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP sebesar 61,40 % .

2.5 Penelaahan Usulan Program

Sebagai tindak lanjut dari target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, maka mengusulkan Program guna mendukung tercapainya target kinerja tersebut. Adapun Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi;
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Program Pengembangan Data Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal;
4. Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal;
5. Program Pelayanan Penanaman Modal;

Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2020 akan lebih mengoptimalkan lagi pengelolaan anggaran khususnya Program Pelayanan Penanaman Modal, yang didalamnya tentang pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik Terpadu.

Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik Terpadu tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan di Mal Pelayanan Publik karena petugas pelayanan mendapatkan beberapa insentif tambahan penghasilan dan sarana serta prasarana pendukung pelayanan di Mal Pelayanan Publik dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Melalui kegiatan fasilitas pelayanan publik terpadu diharapkan pelayanan penanaman modal (perizinan) yang lebih cepat, tepat, murah dan benar di Mal Pelayanan Publik dapat terwujud.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Sasaran Strategis yang berhubungan dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kabupaten terhadap Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga

NO.	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SASARAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Berkualitas	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal melalui Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM PD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima dan Responsif melalui PTSP Pusat dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Sistem Informasi Penanaman Modal yang Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kinerja Lembaga Melalui Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Aparat Yang Mumpuni dalam rangka Menunjang Tugas dan Fungsi BKPM Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Promosi dan Kerjasama	Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal Melalui Promosi yang Terpadu dan Efektif Bagi Penanam Modal dalam dan Luar Negeri yang Berpijak pada Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
				Meningkatnya Kerjasama Internasional untuk Mendorong Investasi dan Melindungi Kepentingan Nasional dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Potensi dan Peluang Investasi yang Berdaya Saing	Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Rekomendasi Kebijakan yang Terintegrasi, Kolaboratif dan Implementatif dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal pada Sektor Prioritas

Memperhatikan tabel di atas, maka dapat diketahui terdapat keterkaitan sasaran strategis dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten) dengan sasaran strategis dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur (RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM RI (RENSTRA K/L).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah Melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman modal yaitu Menyusun, Melaksanakan dan Menetapkan Kebijakan Daerah di Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah serta Rencana Strategis Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, mempunyai fungsi, yaitu:

1. Merumuskan dan Menetapkan, Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal serta Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
2. Melakukan Pengkoordinasian, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016-2021 telah ditetapkan beberapa Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Meningkatkan Investasi yang dapat Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik.

Tujuan tersebut berkaitan langsung dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Selanjutnya

Sasaran Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik.

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut berkaitan dengan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yakni Bertambahnya Nilai Investasi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi guna mencapai sasaran-sasaran tersebut, yaitu:

1. Mendorong Percepatan Pengelolaan Kawasan Strategis dan Potensi Unggulan Daerah;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kedua strategi tersebut berkaitan dengan strategi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu Efektivitas Modal Investasi melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Padat Karya sebagai Tumpuan Utama Pembangunan. Agar dapat melaksanakan Strategi yang telah ditetapkan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi menyusun Kebijakan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kegiatan Promosi Investasi di Tingkat Provinsi dan Nasional;
2. Penyempurnaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal atau Berinvestasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Percepatan Penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi;
4. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan bagi Petugas Layanan atau Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Pengadaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Penanaman Modal yang dapat mendukung kelancaran layanan;
6. Peningkatan Kebijakan Publik termasuk Penyempurnaan Standar Pelayanan secara berkala dan rutin;
7. Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
8. Peningkatan Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat;

9. Berusaha secara terus menerus menciptakan inovasi layanan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas yang signifikan terutama di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi, Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng dan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Rogojampi.

Target Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Target Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 5,00 Trilyun
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM PD)	90 %

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, maka telah mengusulkan beberapa Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2 Sub Kegiatan);
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan, (1 Sub Kegiatan);
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum, (17 Sub Kegiatan);
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan;
3. Program Promosi Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;

Guna memaksimalkan pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, maka telah mengusulkan perubahan anggaran pada beberapa Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021. Adapun Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021 seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan yang Diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
2180101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.896.763.668
21801012.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000
21801012.0101	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000
21801012.0106	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000
21801012.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.466.528.448
21801012.0201	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.441.528.448
21801012.0207	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000
21801012.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.000.000
21.801.012.062	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.000.000
21.801.012.063	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000
21.801.012.064	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000
21.801.012.065	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
21.801.012.066	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang- undangan	10.000.000
21.801.012.068	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	35.000.000
21.801.012.069	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.000.000
21801012.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000
21.801.012.075	Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur	100.000.000
21.801.012.076	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
218.010.120.710	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
21801012.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.235.220
21.801.012.081	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000
21.801.012.082	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.235.220
21.801.012.084	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.000.000
21801012.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.000.000
21.801.012.096	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000
21.801.012.099	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
2180102	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100.000.000
21801022.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100.000.000
21801022.0201	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
21801022.0202	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	50.000.000
2180103	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	50.000.000
21801032.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000
21801032.0102	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
2180104	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	200.000.000
21801042.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.000
21801042.0101	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	200.000.000
2180105	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	280.000.000
21801052.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	280.000.000
21801052.0103	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	280.000.000
2180106	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.000.000
21801062.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
21801062.0101	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000
21801	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.576.763.668

Program-Program tersebut merupakan Program-Program yang nantinya dilaksanakan oleh bidang-bidang yang terdapat dalam struktur nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan Tingkat Capaian Kinerja apakah Tingkat Capaian Kinerja tersebut sesuai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan atau tidak. Adapun indikator masing-masing Program dan Kegiatan (Belanja Langsung) yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5

Program dan Kegiatan yang Diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	95,00 %
1.02.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu	2 Dokumen
1.02.01.1	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dokumen
1.02.01.3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	300 OB
1.02.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	4 Dokumen
1.02.02.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan
1.02.02.4	Sub Kegiatan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Disusun	4 Dokumen
1.02.03	Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran yang Disusun Tepat Waktu	17 Dokumen
1.02.03.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	22 Unit
1.02.03.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
1.02.03.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang Disediakan	12 Bulan
1.02.03.10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		
1.02.03.11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	12 Bulan
1.02.03.12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.159 Kotak
1.02.03.13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan
1.02.03.14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit
1.02.03.15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	95 Buah
1.02.03.16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Unit
1.02.03.17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	102 Unit
1.02.03.18	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Makan dan Minuman yang Disediakan	1 Unit
1.02.03.22	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang Diadakan	1 Lokasi

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.02.03.25	Sub Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah Perlengkapan Gedung Kanror yang Diadakan	8 Unit
1.02.03.30	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Mebelair yang Diadakan	2 Jenis
1.02.03.32	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara Rutin/ Berkala	13 Unit
1.02.03.38	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipeihara Rutin/ Berkala	4 Unit
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH MINAT PENANAMAN MODAL	3 Trilyun
2.18.2.02.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Master Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen
2.18.2.02.02.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Master Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen
2.18.2.02.02.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Master Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota yang Disediakan	1 Dokumen
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN	50 %
2.18.3.03.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Dilaksanakan	2 Kegiatan
2.18.2.03.01.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	2 Kegiatan
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KESESUAIAN PENYELESAIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SESUAI DENGAN SOP	95 %
2.18.4.04.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP	6.250 Dokumen
2.18.4.04.01.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi yang Diterbitkan	6.500 Dokumen
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN	17 %
2.18.5.05.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian PM yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Disusun	2 Dokumen
2.18.5.05.01.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Waktu Pelaksanaan Koodinasi dan Sinkronisasi PM yang Disediakan	12 Bulan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	95,00 %
		PERSENTASE PENYAMPAIAN LKPM	17,00 %
2.18.06.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian yang Disusun Tepat Waktu	5 Laporan
2.18.06.01.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengendalian yang Disusun Tepat Waktu	5 Laporan

Adapun target capaian indikator Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 khusus Bidang Urusan Penanaman Modal, sebagai berikut.

Tabel 3.5

Target Capaian Indikator RKPD Tahun 2021 (RPJMD Tahun 2016-2020)

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN INDIKATOR TAHUN 2020
Penanaman Modal				
1.	Program Pengembangan Data Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	95,00
		Persentase Penyampaian LKPM	%	17,00
2.	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	Rp. Trilyun	3,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kesuaian Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP	%	95,00

3.5 Dana Indikatif dan Sumbernya

Dana indikatif keseluruhan untuk Program dan Kegiatan serta keseluruhan anggaran bagi Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 5.569.803.707,- (Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah), secara keseluruhan anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan durasi 1 (satu) Tahun Anggaran, serta memuat Pprogram dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, yakni Urusan Penanaman Modal. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, ini juga memuat sasaran strategis, indikator sasaran, target hasil dan keluaran yang akan dicapai dan dapat diukur kinerjanya serta sumber dana dan rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui komitmen dan nilai kebersamaan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, mampu mengelola Program dan Kegiatan di Tahun Anggaran 2021 dengan baik sehingga berdampak langsung secara signifikan terhadap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan juga sebagai pengarah bagi semua unsur kekuatan dan faktor penentu keberhasilan untuk mewujudkan strategi yang paling tepat dalam mencapai tujuan dan strategis penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi di Tahun Anggaran 2021. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 juga diharapkan sebagai panduan untuk menggerakkan seluruh kebijakan yang diambil guna mencapai target-target kinerja sasaran strategis didasarkan sumber daya yang tersedia sehingga target-target tersebut dapat tercapai sebagaimana yang ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

ini diharapkan berdampak langsung peningkatan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi setiap Tahun Anggaran. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 ini, dapat disusun tepat waktu, dengan harapan ada masukan atau saran dari semua pihak yang terkait demi kesempurnaannya.

Banyuwangi, Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. WAWAN YADMADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710720 199101 1 002

**POKOK POKOK KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2021**

Pokok-Pokok Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal;
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Unit Penyelenggara Layanan Penanaman Modal;
3. Percepatan Penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi;
4. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM/ Pegawai/ Petugas Layanan Penanaman Modal;
5. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal;
6. Peningkatan Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pengaduan/ Konsultasi Layanan Penanaman Modal;
7. Peningkatan dan Pengelolaan Inovasi Layanan Penanaman Modal.

Adapun Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Mendorong Percepatan Pengelolaan Kawasan Strategis dan Potensi Unggulan Daerah di Kabupaten Banyuwangi;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Banyuwangi, Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



Des. WAWAN YADMADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710720 199101 1 002



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI



2022

RENCANA KERJA (RENJA)

Jl. Jendral Ahmad Yani No.57 Banyuwangi
Telepon/ Fax. 0333 412343
Website : dpmtsp.banyuwangikab.go.id
email : dpmtsp@banyuwangikab.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Berkat Ridho Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022. Berkat kerja sama seluruh pegawai dan arahan pimpinan di Dinas Penanaman Modal dan (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan pengelolaan Program dan Kegiatan oleh seluruh pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun dalam rangka mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022, telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Dokumen Renja ini, bermanfaat bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dan pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi tentang Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 yang disusun ini dirasa belum sempurna, untuk itu perlu kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Demikian Renja ini disusun dan tidak lupa disampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin dengan semua pihak yang terkait.

Banyuwangi, Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. WAWAN YADMADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710720 199101 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman atau acuan yang dipakai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi juga berisi tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026. Sebagaimana diketahui bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 perlu disusun. Hal ini mengingat bahwa RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 telah mengalami perubahan baik tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 5

tahun ke depan. Rencana Kerja Awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini juga diharapkan sudah mengakomodasi beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi di Tahun Anggaran 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016- 2021
32. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
33. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintukabupaten Banyuwangi;
34. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
35. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021;
36. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, yaitu sebagai pedoman atau acuan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan guna tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dan dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, yang telah mengalami perubahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, bab ini berisi gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang menggambarkan pengertian tentang proses penyusunan Rencana Kerja (Renja), keterkaitan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2021-2026, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banyuwangi, memuat peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, memuat penjelasan maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja dan susunan garis besar isi dokumen.
- BAB II** : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, yang mengacu pada Hasil Laporan Kinerja Tahunan atau Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021, Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

- BAB III** : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yaitu penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan hal-hal yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi serta Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
- BAB IV** : **Penutup**, bab ini berisi catatan penting yang mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tidak lanjut Rencana Kerja (Renja) akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi di Tahun Anggaran 2022.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Tribulan I Tahun 2021

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Tribulan II Tahun 2021, dilihat berdasarkan realisasi anggaran tampak sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
Sampai Dengan Tribulan I (Satu) Tahun 2021

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.965.614.573	841.914.630	12,09
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.999.820	0	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.999.910	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.999.910	0	0,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.267.542.793	714.103.326	21,85
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.232.542.883	714.103.326	22,09
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.999.910	0	0,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.049.644.690	24.482.800	1,19
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.993.080	0	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.999.520	0	0,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	199.994.630	20.520.000	10,26
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.189.691.000	0	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.999.960	1.200.000	0,80
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.996.900	0	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.969.600	2.762.800	1,11

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.582.800	0	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.964.600	0	0,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	0	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.618.200	0	0,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.635.020	103.328.504	16,03
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	0	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.235.020	26.928.504	16,70
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	458.400.000	76.400.000	16,67
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.209.450	0	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.994.950	0	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.226.500	0	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.988.000	0	0,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	50.000.000	0	0,00
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0,00
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0,00
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	49.995.330	0	0,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	49.995.330	0	0,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	49.995.330	0	0,00
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.263.113.961	0	0,00
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.263.113.961	0	0,00
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.263.113.961	0	0,00

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	372.456.930	0	0,00
	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	372.456.930	0	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.817.790	0	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	227.262.000	0	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.377.140	0	0,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	99.999.990	0	0,00
	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	99.999.990	0	0,00
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	99.999.990	0	0,00
Jumlah Keseluruhan		9.801.180.784	841.914.630	8,59

Jadi secara keseluruhan capaian kinerja realisasi anggaran sampai dengan Tribulan I Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi hanya sebesar 8.59% atau hanya mampu merealisasikan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 841.914.630,- (Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.801.180.784,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Kinerja realisasi anggaran sampai dengan Tribulan I Tahun 2021 pada masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja realisasi anggaran terbesar terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebesar 12.09% atau sebesar Rp. 841.914.630,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.965.614.573,-;

2. Capaian kinerja realisasi anggaran pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu sebesar 0.00% atau sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-;
3. Capaian kinerja realisasi anggaran pada Program Promosi Penanaman Modal yaitu sebesar 0.00 % atau sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 49.995.330,-;
4. Capaian kinerja realisasi anggaran pada Program Pelayanan Penanaman Modal yaitu sebesar 0.00 % atau sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.263.113.961,-;
5. Capaian kinerja realisasi anggaran pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu sebesar 0.00 % atau sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 372.456.930,-;
6. Capaian kinerja realisasi anggaran pada Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal yaitu sebesar 0.00 % atau sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 99.999.990,-.

Adapun Capaian Kinerja pada masing-masing Program sampai dengan Tribulan I Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dapat dirinci sebagai berikut.

1. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yaitu sebesar 11.49 % dari target kinerja sebesar 95.00%;
2. Capaian Kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan indikator Jumlah Minat Penanaman Modal yaitu sebesar 0 Trilyun Rupiah dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 3,5 Trilyun Rupiah;
3. Capaian Kinerja Program Promosi Penanaman Modal adalah, dengan indikator Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan yaitu sebesar 0% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 50%;
4. Capaian Kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan indikator Persentase Kesesuaian Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP sebesar 0% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 95%;

5. Capaian Kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator Persentase Penyampaian Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Dilaksanakan sebesar 0% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 95%;
6. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal yaitu sebesar 0 % dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 95%.

Capaian Kinerja pada masing-masing Program dan Kegiatan sampai dengan Tribulan I Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tribulan I (Satu) Tahun 2021

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah</i>	95,00%	11,5%	12,08
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun</i>	6 Dokumen	0 Dokumen	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	0 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi capaian kinerja dan ikhtisar realialisasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3 Bulan	2,50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lokasi kebutuhan komponen listrik	4 Lokasi	0 Lokasi	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 Jenis	0 Jenis	0,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	26 Jenis	5 Jenis	19,23
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	0 Bulan	0,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	139.000 Lembar	931 Lembar	0,66
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	0 Jenis	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan rapat di dalam daerah maupun luar daerah	12 Bulan	3 Bulan	2,50
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer, laptop dan printer yang diadakan	13 Unit	0 Unit	0,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung yang diadakan	1 Unit	0 Unit	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang diadakan	4 Unit	0 Unit	0,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	3,34
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan peranko, materai dan benda pos lainnya	12 Bulan	3 Bulan	2,50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	3 Bulan	2,50
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum perkantoran yang disediakan	100 OB	17 OB	17,00

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0,00</i>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas dan komputer	12 Bulan	0 Bulan	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 Unit	0 Unit	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 Paket	0 Paket	0,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah Minat Penanaman Modal</i>	<i>3,5 Trilyun</i>	<i>0 Trilyun</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang dibuat</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0,00</i>
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota yang disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan</i>	<i>50%</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan</i>	<i>2 Bulan</i>	<i>0 Bulan</i>	<i>0,00</i>
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Kesesuaian Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP</i>	<i>95%</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP</i>	<i>6.250 Dokumen</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0,00</i>
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Waktu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan	12 Bulan	0 Bulan	0,00

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Penyampaian Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Dilaksanakan</i>	95%	0%	0,00
	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Waktu Pengendalian Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	12 Bulan	0 Bulan	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN dan UKM yang di survey	216 Lokasi	0 Lokasi	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah bimbingan teknis penanaman modal yang dilaksanakan	2 Kali	0 Kali	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	500 Kali	0 Kali	0,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal</i>	95%	0%	0,00
	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	5 Laporan	0 Laporan	0,00
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah waktu pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan non perizinan	12 Bulan	0 Bulan	0,00

2.1.2 Capaian Rencana Strategis (Renstra)

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi tersebut mendukung pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Misi Nomor 1 yang berbunyi ***“Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan”***
2. Misi Nomor 5 yang berbunyi ***“Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi produktif dan kemudahan berusaha”***

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Visi dan Misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dikerangkai dalam sebuah Tujuan dan Sasaran yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selama periode Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Dalam melaksanakan Misi yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai tujuan yang harus dicapai. Adapun Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi;

Adapun Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Pencapaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selama Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026

NO.	MISI		TUJUAN		SASARAN
1.	Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan	1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah	1	Meningkatnya Investasi Daerah
2.	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi produktif dan kemudahan berusaha	2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran, Formulasi serta Target Indikator Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.4
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET INDIKATOR SASARAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dalam Satu Tahun Anggaran	Rp. 4,2 Trilyun	Rp. 4,3 Trilyun	Rp. 4,4 Trilyun	Rp. 4,5 Trilyun	Rp. 4,6 Trilyun	Rp. 4,8 Trilyun
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90,00 %	90,50%	91,00%	91,50%	92,00 %	92,50 %

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Target Indikator Sasaran Strategis untuk Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA Dan PMDN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4,2 Trilyun, sedangkan Target Indikator Sasaran untuk Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi yaitu Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar 90,00 %.

Hasil Capaian Kinerja atas Tujuan (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA Dan PMDN pada Tahun Anggaran 2021 dan Tujuan (2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi yaitu Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Investasi Daerah
Sampai Dengan Tribulan I Tahun 2021

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (Tribulan I)		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. Trilyun	4,00	4,23	105.75	1,05	0.75	71,42
Rata-Rata Capaian Kinerja					105.75			71,42

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Investasi Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis Realisasi Investasi PMA dan PMDN oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar 105,75 % atau Baik Sekali, sedangkan sampai dengan Tribulan I Tahun 2021 yaitu sebesar 71,42 %.

Tabel 2.6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi
Sampai Dengan Tribulan I Tahun 2021

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	89,00	91,01	102,25	90,00	91,04	101,15
Rata-Rata Capaian Kinerja					102,25			101,15

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 102,25 % atau Baik Sekali, sedangkan sampai dengan Tribulan I Tahun 2021 sebesar 101,15 %.

Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi juga bisa diukur dari Capaian Realisasi Nilai Investasi terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun Capaian Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang tercatat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tahun 2020, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Realisasi Investasi di Kabupaten Banyuwangi
Sampai Dengan Tahun 2020

NO.	JENIS INVESTASI	JUMLAH IZIN	REALISASI INVESTASI (RP)	PERSENTASE (%)	REALISASI TENAGA KERJA (ORANG)
1.	PMA	54	912.641.760.000,-	21.57	18.252
2.	PMDN	14.358	3.318.963.253.724,-	78.53	66.379
Jumlah		14.412	4.231.605.013.724,-	100,00	84.632

Keterangan: Rasio 1 Tenaga Kerja = 50 Juta

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Capaian Kinerja Realisasi Investasi di Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tahun Anggaran 2020, terdiri dari Nilai Realisasi Investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Nilai Realisasi Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Capaian Nilai Realisasi Investasi dari 54 izin PMA tercatat sebesar Rp. 912.641.760.000,- (Sembilan Ratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 21.57% dari Total Realisasi Nilai Investasi, sedangkan dari 14.358 izin PMDN Nilai Investasinya sebesar Rp. 3.318.963.253.724,- (Tiga Trilyun Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 78.53 % dari Total Realisasi Nilai Investasi.

Jadi secara Keseluruhan Realisasi Nilai Investasi dari PMA dan PMDN di Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.231.605.013.724,- (Empat Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Apabila diasumsikan bahwa 1 Orang Tenaga Kerja setara dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) maka nilai realisasi investasi di Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tahun 2020 sebanding dengan 84.632 orang Tenaga Kerja, atau bisa diartikan bahwa realisasi nilai investasi tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 84.632 orang Tenaga Kerja.

2.1.3 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, bahwa mulai tanggal 6 Oktober 2017 pelayanan penanaman modal (perizinan) diselenggarakan atau dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik

secara terintegrasi dibawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Pada Tahun 2020 Mal Pelayanan Publik Banyuwangi telah menyelenggarakan pelayanan sebanyak 213 jenis pelayanan publik. Selain Mal Pelayanan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi tepat pada tanggal 22 April 2019 juga telah meresmikan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng dan pada Tanggal 19 Desember 2019 juga telah mengoperasikan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Rogojampi yang mampu melayani sebanyak 98 jenis pelayanan publik. Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng dan Kecamatan Rogojampi merupakan bentuk Mini Mal yang merupakan Unit Layanan Publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memberikan akses layanan publik dan mendekatkan layanan kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi sehingga memenuhi harapan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih cepat dan mudah.

Keberhasilan pelaksanaan urusan penanaman modal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi juga dapat dilihat dari jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan dalam 1 (satu) Tahun. Berdasarkan catatan diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tahun 2020 yaitu sebanyak 6.203 dokumen. Selengkapnya jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tahun 2020, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Rekapitulasi Jumlah Dokumen Perizinan yang Diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2020

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH PEMOHON
1.	Izin Lokasi	0
2.	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	131
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.645
4.	Tanda Daftar perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB)	1.731
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	397
6.	Izin Usaha Industri (TDI)	0
7.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Pasar Tradisional (IUP2T)/TokoModern (IUTM)	0
8.	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam	12
9.	Izin Trayek / Izin Operasional	0
10.	Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas c/d	2
11.	Izin Puskesmas	3
12.	Izin mendirikan dan izin operasional klinik	17
13.	Izin Apotik	33
14.	Izin Praktek Bidan	416
15.	Izin Optik	4
16.	Tanda Daftar Gudang	27
17.	Izin Usaha Peternakan	0
18.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	34
19.	Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah	0
20.	Izin penyelenggaraan reklame	666
21.	Izin Usaha Perdagangan – Minuman Beralkohol	5
22.	Surat Izin Usaha Jasa Medik veteriner	0
23.	Izin Prinsip	0
24.	Izin Rumah Kost	7
25.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	39
26.	Surat Izin Paramedik Veteriner	0
27.	Izin Usaha Industri (IUI)	34
JUMLAH		6.203

Capaian Realisasi Retribusi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat sebagaimana tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11

Realisasi Retribusi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tahun 2020

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.311.722.000,-	768.560.496,-	32,28
2.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	160.000.000,-	190.000.000,-	110,75
3.	Izin Gangguan	-	480.000,-	-
4.	Izin Trayek	120.000,-	120.000,-	100,00
Jumlah Retribusi		2.471.842.000,-	959.160.496,-	38,80
1.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	20.482.686,-	-
Jumlah Retribusi		-	20.482.686,-	-
Jumlah Total		2.471.842.000,-	979.643.182,-	39,63

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Capaian Realisasi Retribusi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Retribusi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 768.560.496,- dari target sebesar Rp. 2.311.722.000,- atau sebesar 32,28 %;
2. Capaian Realisasi Retribusi dari Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebesar Rp. 190.000,- dari target sebesar Rp. 160.000.000,- atau sebesar 110,75%;
3. Capaian Realisasi Retribusi dari Gangguan sebesar Rp. 480.000,-;
4. Capaian Realisasi Retribusi dari Izin Trayek sebesar Rp. 120.000,- dari target sebesar Rp. 120.000.000,- atau sebesar 100,00%;
5. Capaian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp. 20.482.686,-.

Capaian realisasi retribusi yang tidak sampai 70,00 % dari target disebabkan antara lain:

1. Penetapan target retribusi yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran yang terlalu besar sehingga sulit untuk diwujudkan;
2. Nilai retribusi untuk semua obyek retribusi yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Retribusi perlu dinaikkan sebab sampai saat ini nilai retribusi tersebut terlalu kecil;
3. Pemungutan retribusi perlu dilakukan dengan peningkatan kerjasama di lapangan yang lebih terintegrasi antara petugas pemungut retribusi dengan petugas Satuan Polisi

- Pamong Praja dan unsur pimpinan di wilayah;
4. Perlu dikembangkannya sistem retribusi berbasis Teknologi Informasi (TI) yang telah ada sehingga dapat membantu secara maksimal terhadap realisasi pemungutan retribusi dan mempermudah petugas pemungut di lapangan.
 5. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Retribusi perlu dinaikkan sebab sampai saat ini nilai retribusi tersebut terlalu kecil;
 6. Pemungutan retribusi perlu dilakukan dengan peningkatan kerjasama di lapangan yang lebih terintegrasi antara petugas pemungut retribusi dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur pimpinan di wilayah;
 7. Perlu dikembangkannya sistem retribusi berbasis Teknologi Informasi (TI) yang telah ada sehingga dapat membantu secara maksimal terhadap realisasi pemungutan retribusi dan mempermudah petugas pemungut di lapangan.

2.1.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

1. Perlu peningkatan optimalisasi pengetahuan dan keterampilan SDM pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
2. Kurang tersosialisasinya peraturan di bidang perizinan dan non perizinan serta penanaman modal secara masif atas regulasi yang begitu cepat berubah;
3. Belum terintegrasinya standar pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
4. Belum optimalnya implementasi atas tersusunnya regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
5. Belum terbentuknya tim fasilitas percepatan dari pengembangan kawasan industri terpadu;
6. Belum Optimalnya Implementasi Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Komunikasi, Koordinasi dan Sinkronisasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam pemberian pelayanan perizinan

- dan non perizinan serta penanaman modal;
2. Implementasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pedoman penyelenggaraan PTSP;
 3. Pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia/ petugas pelayanan yang masih belum optimal terutama kompetensi terkait dengan pelayanan berbasis teknologi informasi;
 4. Masih belum dibentuknya tim di Tingkat Kabupaten untuk mendorong percepatan pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi;
 5. Belum ditetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi.

Beberapa solusi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut, antara lain

1. Membangun kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan cara melakukan pertemuan secara berkala dan berkelanjutan;
2. Melakukan penyempurnaan mulai dari aspek kelembagaan, SDM dan mekanisme pelayanan, Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mengirim pegawai untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis tentang sistem pelayanan berbasis teknologi informasi;
4. Memberikan telaahan staf terkait pentingnya dibentuknya tim percepatan pengelolaan kawasan industri di Banyuwangi;
5. Segera mengusulkan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi.

2.1.5 Review Terhadap RKPD

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan **Visi** Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi selama 5 tahun yakni ***“Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah”*** Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yakni:

1. Misi Nomor 1 yang berbunyi *“Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.”*
2. Misi Nomor 5 yang berbunyi *“Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha”*

Berdasarkan telaahan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di atas maka Sasaran Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berhubungan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan;
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa.

Selanjutnya seluruh pengelolaan Program dan Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi diarahkan pada penyelesaian Permasalahan Isu-Isu Strategis tersebut. Sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) penunjang pada RKPD Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2022 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Realisasi Investasi PMA dan PMDN;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Adapun Capaian Indikator Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 khusus Bidang Urusan Penanaman Modal, sebagai berikut.

Tabel 2.12
Capaian Indikator RKPD Tahun 2020 (RPJMD Tahun 2016-2020)

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR TAHUN 2020		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Penanaman Modal						
1.	Program Pengembangan Data Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	95,00	96,00	101,05
		Persentase Penyampaian LKPM	%	17,00	21,00	123,53
2.	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	Rp. Trilyun	3,00	4,20	140,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kesuaian Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP	%	95,00	95,00	100,00

Capaian realisasi target indikator RKPD Tahun 2020 dalam RPJMD Tahun 2016-2021 Bidang Urusan Pemerintahan yaitu Penanaman Modal yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yakni Baik Sekali, hal ini dikarenakan dari masing-masing Indikator Kinerja Program rata-rata 100%. Indikator Kinerja Program yang paling besar adalah Persentase Peningkatan LKPM yakni sebesar 123,53% sedangkan pencapaian yang paling rendah adalah Indikator Kinerja Program Persentase Kesesuaian Pelayanan Perizinan sesuai dengan SOP yaitu 100,00%.

Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Realisasi Target Indikator masing-masing Program Setiap Tahunnya dapat dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam target RKPD Tahun 2016-2021.

2.5 Penelaahan Usulan Program

Sebagai tindak lanjut dari target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, maka mengusulkan Program guna mendukung tercapainya target kinerja tersebut. Adapun Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2020 akan lebih mengoptimalkan lagi pengelolaan anggaran khususnya Program Pelayanan Penanaman Modal, yang didalamnya tentang pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu.

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan di Mal Pelayanan Publik karena petugas pelayanan mendapatkan beberapa insentif tambahan penghasilan dan sarana serta prasarana pendukung pelayanan di Mal Pelayanan Publik dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Melalui kegiatan fasilitasi pelayanan publik terpadu diharapkan pelayanan penanaman modal (perizinan) yang lebih cepat, tepat, murah dan benar di Mal Pelayanan Publik dapat terwujud.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Sasaran Strategis yang berhubungan dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kabupaten terhadap Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga

NO.	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SASARAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Berkualitas	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal melalui Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM PD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima dan Responsif melalui PTSP Pusat dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Sistem Informasi Penanaman Modal yang Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kinerja Lembaga Melalui Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Aparat Yang Mumpuni dalam rangka Menunjang Tugas dan Fungsi BKPM Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Promosi dan Kerjasama	Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal Melalui Promosi yang Terpadu dan Efektif Bagi Penanam Modal dalam dan Luar Negeri yang Berpijak pada Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
				Meningkatnya Kerjasama Internasional untuk Mendorong Investasi dan Melindungi Kepentingan Nasional dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Potensi dan Peluang Investasi yang Berdaya Saing	Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Rekomendasi Kebijakan yang Terintegrasi, Kolaboratif dan Implementatif dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal pada Sektor Prioritas

Memperhatikan tabel di atas, maka dapat diketahui terdapat keterkaitan sasaran strategis dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten) dengan sasaran strategis dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur (RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM RI (RENSTRA K/L).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah Melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman modal yaitu Menyusun, Melaksanakan dan Menetapkan Kebijakan Daerah di Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah serta Rencana Strategis Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, mempunyai fungsi, yaitu:

1. Merumuskan dan Menetapkan, Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal serta Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
2. Melakukan Pengkoordinasian, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016-2021 telah ditetapkan beberapa Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Meningkatkan Investasi yang dapat Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik.

Tujuan tersebut berkaitan langsung dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Selanjutnya

Sasaran Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik.

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut berkaitan dengan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yakni Bertambahnya Nilai Investasi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi guna mencapai sasaran-sasaran tersebut, yaitu:

1. Mendorong Percepatan Pengelolaan Kawasan Strategis dan Potensi Unggulan Daerah;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kedua strategi tersebut berkaitan dengan strategi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu Efektivitas Modal Investasi melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Padat Karya sebagai Tumpuan Utama Pembangunan. Agar dapat melaksanakan Strategi yang telah ditetapkan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi menyusun Kebijakan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kegiatan Promosi Investasi di Tingkat Provinsi dan Nasional;
2. Penyempurnaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal atau Berinvestasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Percepatan Penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi;
4. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan bagi Petugas Layanan atau Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Pengadaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Penanaman Modal yang dapat mendukung kelancaran layanan;
6. Peningkatan Kebijakan Publik termasuk Penyempurnaan Standar Pelayanan secara berkala dan rutin;
7. Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
8. Peningkatan Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat;

9. Berusaha secara terus menerus menciptakan inovasi layanan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas yang signifikan terutama di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi, Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng dan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Rogojampi.

Target Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Target Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 5,00 Trilyun
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM PD)	90 %

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, maka telah mengusulkan beberapa Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2 Sub Kegiatan);
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan, (1 Sub Kegiatan);
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum, (17 Sub Kegiatan);
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan;
3. Program Promosi Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;

Guna memaksimalkan pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, maka telah mengusulkan perubahan anggaran pada beberapa Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021. Adapun Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021 seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan yang Diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
2180101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.896.763.668
21801012.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000
21801012.0101	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000
21801012.0106	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000
21801012.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.466.528.448
21801012.0201	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.441.528.448
21801012.0207	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000
21801012.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.000.000
21.801.012.062	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.000.000
21.801.012.063	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000
21.801.012.064	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000
21.801.012.065	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
21.801.012.066	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000
21.801.012.068	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	35.000.000
21.801.012.069	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.000.000
21801012.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000
21.801.012.075	Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur	100.000.000
21.801.012.076	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
218.010.120.710	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
21801012.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.235.220
21.801.012.081	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000
21.801.012.082	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.235.220
21.801.012.084	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.000.000
21801012.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.000.000
21.801.012.096	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000
21.801.012.099	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
2180102	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100.000.000
21801022.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100.000.000
21801022.0201	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
21801022.0202	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	50.000.000
2180103	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	50.000.000
21801032.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000
21801032.0102	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
2180104	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	200.000.000
21801042.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.000
21801042.0101	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	200.000.000
2180105	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	280.000.000
21801052.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	280.000.000
21801052.0103	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	280.000.000
2180106	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.000.000
21801062.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
21801062.0101	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000
21801	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.576.763.668

Program-Program tersebut merupakan Program-Program yang nantinya dilaksanakan oleh bidang-bidang yang terdapat dalam struktur nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan Tingkat Capaian Kinerja apakah Tingkat Capaian Kinerja tersebut sesuai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan atau tidak. Adapun indikator masing-masing Program dan Kegiatan (Belanja Langsung) yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5

Program dan Kegiatan yang Diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	95,00 %
1.02.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu	2 Dokumen
1.02.01.1	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dokumen
1.02.01.3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	300 OB
1.02.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	4 Dokumen
1.02.02.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan
1.02.02.4	Sub Kegiatan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Disusun	4 Dokumen
1.02.03	Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran yang Disusun Tepat Waktu	17 Dokumen
1.02.03.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	22 Unit
1.02.03.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
1.02.03.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang Disediakan	12 Bulan
1.02.03.10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		
1.02.03.11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	12 Bulan
1.02.03.12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.159 Kotak
1.02.03.13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan
1.02.03.14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit
1.02.03.15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	95 Buah
1.02.03.16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Unit
1.02.03.17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	102 Unit
1.02.03.18	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Makan dan Minuman yang Disediakan	1 Unit
1.02.03.22	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang Diadakan	1 Lokasi

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.02.03.25	Sub Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah Perlengkapan Gedung Kanror yang Diadakan	8 Unit
1.02.03.30	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Mebelair yang Diadakan	2 Jenis
1.02.03.32	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara Rutin/ Berkala	13 Unit
1.02.03.38	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipeihara Rutin/ Berkala	4 Unit
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH MINAT PENANAMAN MODAL	3 Trilyun
2.18.2.02.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Master Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen
2.18.2.02.02.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Master Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen
2.18.2.02.02.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Master Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota yang Disediakan	1 Dokumen
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN	50 %
2.18.3.03.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Dilaksanakan	2 Kegiatan
2.18.2.03.01.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	2 Kegiatan
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KESESUAIAN PENYELESAIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SESUAI DENGAN SOP	95 %
2.18.4.04.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP	6.250 Dokumen
2.18.4.04.01.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi yang Diterbitkan	6.500 Dokumen
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN	17 %
2.18.5.05.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian PM yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Disusun	2 Dokumen
2.18.5.05.01.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Waktu Pelaksanaan Koodinasi dan Sinkronisasi PM yang Disediakan	12 Bulan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	95,00 %
		PERSENTASE PENYAMPAIAN LKPM	17,00 %
2.18.06.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian yang Disusun Tepat Waktu	5 Laporan
2.18.06.01.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengendalian yang Disusun Tepat Waktu	5 Laporan

Adapun target capaian indikator Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 khusus Bidang Urusan Penanaman Modal, sebagai berikut.

Tabel 3.5

Target Capaian Indikator RKPD Tahun 2021 (RPJMD Tahun 2016-2020)

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN INDIKATOR TAHUN 2020
<i>Penanaman Modal</i>				
1.	Program Pengembangan Data Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	95,00
		Persentase Penyampaian LKPM	%	17,00
2.	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	Rp. Trilyun	3,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kesuaian Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP	%	95,00

3.5 Dana Indikatif dan Sumbernya

Dana indikatif keseluruhan untuk Program dan Kegiatan serta keseluruhan anggaran bagi Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 5.569.803.707,- (Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah), secara keseluruhan anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan durasi 1 (satu) Tahun Anggaran, serta memuat Pprogram dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, yakni Urusan Penanaman Modal. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, ini juga memuat sasaran strategis, indikator sasaran, target hasil dan keluaran yang akan dicapai dan dapat diukur kinerjanya serta sumber dana dan rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui komitmen dan nilai kebersamaan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, mampu mengelola Program dan Kegiatan di Tahun Anggaran 2021 dengan baik sehingga berdampak langsung secara signifikan terhadap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan juga sebagai pengarah bagi semua unsur kekuatan dan faktor penentu keberhasilan untuk mewujudkan strategi yang paling tepat dalam mencapai tujuan dan strategis penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi di Tahun Anggaran 2021. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 juga diharapkan sebagai panduan untuk menggerakkan seluruh kebijakan yang diambil guna mencapai target-target kinerja sasaran strategis didasarkan sumber daya yang tersedia sehingga target-target tersebut dapat tercapai sebagaimana yang ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

ini diharapkan berdampak langsung peningkatan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi setiap Tahun Anggaran. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 ini, dapat disusun tepat waktu, dengan harapan ada masukan atau saran dari semua pihak yang terkait demi kesempurnaannya.

Banyuwangi, Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



Dis. WAWAN YADMADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710720 199101 1 002

**POKOK POKOK KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2021**

Pokok-Pokok Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal;
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Unit Penyelenggara Layanan Penanaman Modal;
3. Percepatan Penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi;
4. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM/ Pegawai/ Petugas Layanan Penanaman Modal;
5. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal;
6. Peningkatan Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pengaduan/ Konsultasi Layanan Penanaman Modal;
7. Peningkatan dan Pengelolaan Inovasi Layanan Penanaman Modal.

Adapun Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Mendorong Percepatan Pengelolaan Kawasan Strategis dan Potensi Unggulan Daerah di Kabupaten Banyuwangi;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Banyuwangi, Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. WAWAN YADMADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710720 199101 1 002

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUWANGI

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

2023

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416
Telepon : (0333) 412343 Faks (0333) 412343
email : dppmptspbwi@banyuwangikab.go.id
website : www.dppmptspbwi.banyuwangikab.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Berkat Ridho Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023. Berkat kerja sama seluruh pegawai dan arahan pimpinan di Dinas Penanaman Modal dan (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, Dokumen Rancangan Akhir Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan pengelolaan Program dan Kegiatan oleh seluruh pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun dalam rangka mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Dokumen Rancangan Akhir Renja ini, bermanfaat bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dan pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi tentang Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 yang disusun ini dirasa belum sempurna, untuk itu perlu kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Demikian Renja ini disusun dan tidak lupa disampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin dengan semua pihak yang terkait.

Banyuwangi, 26 Juli 2022

DI BANTU OLEH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



PARTANA, S.AP, M.Si
Pembina
NIP. 19710120 199403 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii-iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	9
2.1 Evaluasi Renja dan Capaian Renstra	9
2.1.1 Evaluasi Renja Tahun 2021	9
2.1.2 Capaian Renstra	35
2.1.3 Analisis Kinerja Pelayanan	38
2.1.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	43
2.1.5 Review terhadap RKPD	45
2.2 Penelaahan Usulan Program	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	49
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	50
3.3 Program dan Kegiatan	52
3.4 Indikator Kinerja	57
3.5 Dana Indikatif dan Sumbernya	60
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	
Pokok Pokok Kebijakan dan Strategi Dinas Penanaman Modal dan	
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja Berdasarkan Skala Ordinal.....	10
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021	11
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 – 2026	12
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dibanding dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur serta Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI/ Nasional	15
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Masing-Masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021	17
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Masing-Masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021	19
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021	23
Tabel 2.8 Jumlah Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2021	29
Tabel 2.9 Tingkat Efektivitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021	33
Tabel 2.10 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021	34

		Halaman
Tabel 2.11	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026	36
Tabel 2.12	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026	37
Tabel 2.13	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Investasi Daerah Tahun 2021	38
Tabel 2.14	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi Tahun 2021	39
Tabel 2.15	Rekapitulasi Jumlah Dokumen Perizinan yang Diterbitkan melalui Aplikasi Non OSS-RBA oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2021	47
Tabel 2.16	Capaian Indikator RKPD Tahun 2021 (RPJMD Tahun 2021-2026)	49
Tabel 3.1	Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/ Lembaga	49
Tabel 3.2	Target Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023	52
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan yang Diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023	55
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan yang Diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023	57
Tabel 3.5	Target Capaian Indikator RKPD Tahun 2021 (RPJMD Tahun 2021-2026)	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi merupakan Pedoman atau Acuan yang dipakai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi juga berisi tentang pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka Pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026. Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi maka Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 perlu disusun. Hal ini mengingat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 sebagai Dasar Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 baik Tujuan maupun Sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini juga diharapkan sudah mengakomodasi beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
9. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
12. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
14. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penganganan Pandemi Corona Virus dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026;
45. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
46. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
47. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
48. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;

49. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

50. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

51. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, yaitu sebagai Pedoman atau Acuan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan guna tercapainya Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dan dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, bab ini berisi Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang menggambarkan pengertian tentang proses penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja), keterkaitan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2021-2026, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banyuwangi, memuat peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, memuat penjelasan maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja dan susunan garis besar isi dokumen.
- BAB II** : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, yang mengacu pada Hasil Laporan Kinerja Tahunan atau Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021, Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

- BAB III** : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, bab ini memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi yaitu penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan hal-hal yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi serta Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2021-2026.
- BAB IV** : **Penutup**, bab ini berisi catatan penting yang mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tidak lanjut Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Banyuwangi di Tahun Anggaran 2023.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016-2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi menggambarkan Tingkat Pencapaian Sasaran, Indikator Sasaran serta Tingkat Pencapaian masing-masing Program dan Kegiatan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi juga menginformasikan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.

Secara umum berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Diketahui terdapat 2 (Dua) Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021, yaitu:

- 1) Meningkatkan Investasi yang Dapat Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- 2) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik dengan Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sedangkan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, yaitu:

- 1) Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN;
- 2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Publik dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi diperoleh berdasarkan pengukuran atas capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Kesimpulan Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dilakukan dengan membuat Rata-Rata atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021. Adapun Predikat Nilai Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, didasarkan pada Skala Pengukuran Ordinal di bawah ini.

Tabel 2.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja Berdasarkan Skala Ordinal

NO.	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	> 100 %	Baik Sekali
2.	> 75 - 100 %	Baik
3.	55 - 75 %	Cukup
4.	< 55 %	Kurang

NO.	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	> 85 %	Sangat Berhasil
2.	70 - 85 %	Berhasil
3.	55 - 69 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Tidak Berhasil

Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021 Tidak Dilakukan Pengukuran sehubungan Tidak Ditetapkan untuk Target Indikator Tujuan sebelumnya, sehingga Analisis Capaian Kinerjanya juga tidak dapat disusun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 hanya dapat mengetahui Capaian Indikator Kinerja Utama pada Indikator Sasaran Strategis (IKU Sasaran Strategis) sehubungan telah ditetapkan Besaran untuk Target Indikator Sasaran Strategis sebelumnya. Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	IDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun (Rp)	4,50	6,54	145,33
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen (%)	90,00	90.09	100,10

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar **145,33 %** (melampaui target yang telah ditetapkan) atau **“Baik Sekali”**

berdasarkan Skala Pengukuran Ordinal.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **100,10 %** (melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya) atau **“Baik Sekali”** berdasarkan Skala Pengukuran Ordinal.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun yang Lalu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026

NO.	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	TAHUN ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	TARGET KINERJA (Trilyun Rp.)					
		1,75	1,80	1,85	3,50	4,00	4,50
		REALISASI KINERJA (Trilyun Rp.)					
		2,32	2,33	3,82	3,91	4,20	6,54
		CAPAIAN KINERJA (%)					
		132,57	129,44	206,49	111,71	105,00	145,33
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	TARGET KINERJA (%)					
		85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00
		REALISASI KINERJA (%)					
		87,21	87,35	89,00	89,00	91,01	90,09
		CAPAIAN KINERJA (%)					
		102,60	101,57	102,30	101,14	102,26	100,10

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selama 6 (Enam) Tahun terakhir Rata-Rata

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN sebesar 138,42 % (Baik Sekali) dan Capaian Kinerja Terbesar terjadi pada Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar 206,49 % (Baik Sekali) dan Capaian Kinerja Terkecil terjadi pada Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar 105,00 % (Baik Sekali). Jadi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selama 6 (Enam) Tahun terakhir rata-rata **“Baik Sekali”** atau rata-rata diatas 100,00 % (Baik Sekali).

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selama 6 (Enam) Tahun terakhir juga mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Capaian Kinerja Tertinggi dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar 102,60 % (Baik Sekali) dan Capaian Kinerja Terendah dicapai pada Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar 100,10 % (Baik Sekali). Jadi selama 6 Tahun terakhir, Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebesar 101,66 % rata-rata **“Baik Sekali”** atau rata-rata diatas 100,00 % (Baik Sekali).

Perbandingan Realisasi Kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021 untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Target jangka Menengah sebagaimana yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi atau Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 menunjukkan Capaian Realisasi Kinerja yang “Baik Sekali” yang artinya Capaian Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya melampaui dari Target Nilai Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Rata-rata Realisasi Kinerja untuk IKU: Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan sebesar 138,42 % (Baik Sekali), sedangkan untuk IKU: Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Realisasi Kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan sebesar 101,66 % (Baik Sekali).

Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi Kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2021 telah sesuai bahkan melebihi target kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Perbandingan Capaian Kinerja khusus Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur serta Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (Nasional) pada Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dibanding dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur serta Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI/ Nasional

INDIKATOR KINERJA SKPD	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	(Rp.) Trilyun	DPM PTSP KAB BANYUWANGI		
		4,50	6,54	145,33
		DPM PTSP PROVINSI JAWA TIMUR		
		67,00	79,5	118,66
		BKPM RI/ NASIONAL		
		900,00	901,00	100,11

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Capaian Kinerja (Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 6,54 Trilyun atau sebesar 145,33 % dari target sebesar Rp. 4,50 Trilyun. Adapun Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 79,50 Trilyun atau sebesar 118,66 % dari target sebesar Rp. 67,00 Trilyun, sedangkan Capaian Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (Nasional) pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 901,00 Trilyun atau sebesar 100,11 % dari target sebesar Rp. 900,00 Trilyun.

Jadi apabila dibandingkan maka Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (**145,33 %**) lebih baik daripada Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (**118,66 %**) dan Capaian Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal RI/ Nasional (**100,11 %**).

Penyebab Keberhasilan Peningkatan Capaian Kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021, antara lain:

- 1) Penyederhanaan Sistem Pelayanan Penanaman Modal;
- 2) Peningkatan Kualitas Kegiatan Promosi Investasi di Kabupaten Banyuwangi;
- 3) Keadaan Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang kondusif;

- 4) Keberadaan Potensi Investasi di Kabupaten Banyuwangi yang Beragam;
- 5) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Swasta dan Masyarakat.

Upaya Perbaikan Kinerja ke Depan, yang dilakukan oleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

- 1) Percepatan Penetapan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi;
- 2) Penetapan dan Pengelola Kawasan Industri di Kabupaten Banyuwangi;
- 3) Percepatan Penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banyuwangi;
- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal (Perizinan dan Non Perizinan) dengan Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Inovasi Pendukung yang perlu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi:

1. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Penanaman Modal (Tidak melalui Aplikasi OSS-RBA);
2. Aksesibilitas terhadap Unit Pelayanan Penanaman yang lebih banyak dan mudah (Mal Pelayanan Publik, Pasar Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Perikanan Terpadu).

Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Masing-Masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung
 Capaian Kinerja Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	KINERJA		
			TARGET FISIK	REALISASI FISIK	%
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Minat Penanaman Modal	Rp. 3,50 Trilyun	Rp. 6,54 Trilyun	186,86
1.1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	50,00%	49,74%	99,48
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00
2.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyampaian Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Dilaksanakan	95,00%	46,45%	48,89
3.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Waktu Pengendalian Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	12 Bulan	6 Bulan	50,00
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN dan UKM yang Di survey	216 Lokasi	9 Lokasi	4,17
5.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimbingan Teknis Penanaman Modal yang Dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	100,00
5.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 Kali	90 Kali	18,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Program yang mendukung
 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 yakni

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Indikator Program, Jumlah Minat Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja sebesar 186,86 % (Baik Sekali). Program ini dilakukan melalui 1 Kegiatan, yaitu Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00% (Baik Sekali) dan 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali);
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan Indikator Program, Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan, dengan Capaian Kinerja sebesar 99,48 % (Baik). Program ini dilakukan melalui 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali);
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator program, Persentase Penyampaian Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan, dengan Capaian Kinerja sebesar 48,89 % (Kurang). Program ini dilakukan melalui 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 50,00 % (Kurang). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan, antara lain:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja sebesar 4,17 % (Kurang);

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali);
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja sebesar 18,00 % (Kurang).

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Masing-Masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	KINERJA		
			TARGET FISIK	REALISASI FISIK	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	95,00%	79,64%	83,83
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00
1.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penggangan Perangkat Daerah yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun	12 Laporan	12 Laporan	100,00
1.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Dikoordinasikan/ Disusun	12 Laporan	12 Laporan	100,00
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00

1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	51 Jenis	51 Jenis	100,00
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	139.000 Lbr	139.000 Lbr	100,00
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100,00
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lokasi Kebutuhan Komponen Listrik	4 Lokasi	4 Lokasi	100,00
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pelaksanaan Rapat di Dalam Daerah maupun Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.3.7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Jenis	26 Jenis	100,00
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Perkantoran yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
1.5.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Komputer	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung yang Dipelihara	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer, Laptop dan Printer yang Diadakan	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung yang Diadakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang Diadakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
2.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	95,00%	77,10%	81,16%

2.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan SOP	6.250 Dokumen	5.770 Dokumen	100,00
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Waktu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	95,00%	90,00%	94,74
3.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	5 Laporan	5 Laporan	100,00
3.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Waktu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	5 Laporan	5 Laporan	100,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Program - Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Indikator Program, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah, Capaian Kinerjanya sebesar atau 83,83 % (Baik). Program ini dilakukan melalui 6 (Enam) Kegiatan, yang meliputi:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 Sub Kegiatan;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 Sub Kegiatan;

- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 7 Sub Kegiatan;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan;
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP, dengan Capaian Kinerja sebesar 81,16 % (Baik). Program ini dilaksanakan melalui 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 1 Sub Kegiatan yakni Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Indikator Program, dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja sebesar 94,74 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 1 Sub Kegiatan yakni Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali).

Laporan Kinerja Keuangan (Realisasi Keuangan) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, memberikan Gambaran Penilaian Tingkat Pencapaian Target Realisasi Anggaran Sasaran dari masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengukuran Kinerja Keuangan yang digunakan untuk Menilai Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian Kinerja Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	150.000.000	149.425.965	99,62
1.1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	150.000.000	149.425.965	99,62
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	150.000.000	149.425.965	99,62
2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	54.498.350	54.220.320	99,49
2.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	54.498.350	54.220.320	99,49
2.1.1	Sub Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	54.498.350	54.220.320	99,49
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	372.456.930	182.095.000	48,89
3.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	372.456.930	182.095.000	48,89
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.817.790	2.120.000	4,17
3.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	227.262.000	162.375.000	71,45
3.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.377.140	17.600.000	18,65
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.194.342.163	6.264.840.187	87,08
4.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.999.820	69.923.040	99,89
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.999.910	34.924.670	99,79
4.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.999.910	34.998.370	100,00

4.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.267.542.793	2.686.554.455	82,22
4.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.999.910	34.958.370	99,88
4.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.232.542.883	2.651.596.085	82,03
4.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.100.919.500	1.922.573.519	91,51
4.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.999.520	149.448.850	99,63
4.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.999.960	149.874.560	99,92
4.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.996.900	6.600.000	66,02
4.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	175.267.890	159.371.885	90,93
4.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	989.691.000	907.700.000	91,72
4.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.969.600	160.247.274	69,68
4.3.7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	395.994.630	389.330.950	98,32
4.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	769.435.020	643.041.183	83,57
4.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.235.020	142.134.383	56,57
4.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	478.200.000	469.450.000	98,17
4.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	31.456.800	78,64
4.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.862.230	447.204.390	91,85
4.5.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.250.230	137.378.590	89,06
4.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	188.553.800	94,28
4.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.612.000	121.272.000	91,45
4.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.582.800	495.543.600	99,19
4.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.964.600	196.818.600	98,43
4.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	199.505.000	99,75
4.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.618.200	99.220.000	99,60
5.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	853.456.851	692.616.685	81,15
5.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	853.456.851	692.616.685	81,15
5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	853.456.851	692.616.685	81,15

6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	99.999.990	15.257.890	15,26
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	99.999.990	15.257.890	15,26
6.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	99.999.990	15.257.890	15,26
TOTAL		8.724.754.284	7.358.456.047	84,34

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Realisasi Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.358.456.047,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau 84,34 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.724.754.284,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Program-Program yang mendukung mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Capaian Kinerja Kuangannya sebesar 99,62 % (Baik). Program ini dilakukan melalui 1 Kegiatan, yaitu Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 99,62 % (Baik) dan 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 99,62 % (Baik);
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan Capaian Kinerja Kuangannya sebesar 99,49 % (Baik). Program ini dilakukan melalui 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja Kuangannya sebesar 99,49 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 1

Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 99,49 % (Baik);

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 48,89 % (Kurang). Program ini dilakukan melalui 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 48,89 % (Kurang). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan, antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 4,17 % (Kurang);
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 71,45 % (Cukup);
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 18,65 % (Kurang).

Jadi Jumlah Total Pagu Anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 576.955.280,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) sedangkan Total Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 385.741.285,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atas sebesar Rp. 66,86 %.

Adapun Program-Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar atau 87,08 % (Baik). Program ini dilakukan melalui 6 (Enam) Kegiatan, yang meliputi:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 99,89 % (Baik). Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 Sub Kegiatan;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 82,22 % (Baik). Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 Sub Kegiatan;
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 91,51 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 7 Sub Kegiatan;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 83,57 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 91,85 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan;
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 99,19 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Indikator Program, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 81,15 % (Baik). Program ini dilaksanakan melalui 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 81,15 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 1 Sub Kegiatan yakni Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 15,26 % (Kurang). Program

ini dilakukan melalui 1 Kegiatan yakni Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 15,26 % (Kurang). Kegiatan ini dilakukan melalui 1 Sub Kegiatan yakni Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Jadi Jumlah Total Pagu Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp. 8.147.799.004,- (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Rupiah) sedangkan Total Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 6.977.714.402,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) atas sebesar Rp. 85,58 %.

Jumlah Anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, sebelum dan sesudah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) juga dapat menggambarkan kinerja efektivitas dan efisiensi atas pengelolaan anggaran dan capaian kinerja yang dapatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021. Jumlah Anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.8

Jumlah Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2021

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	PAGU ANGGARAN SEBELUM PAK (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK (Rp.)	TAMBAH/ KURANG (Rp.)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	50.000.000	150.000.000	100.000.000
1.1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	50.000.000	150.000.000	100.000.000
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	50.000.000	150.000.000	100.000.000
2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	49.995.330	54.498.350	4.503.020
2.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	49.995.330	54.498.350	4.503.020
3.1.1	Sub Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	49.995.330	54.498.350	4.503.020
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	372.456.930	372.456.930	0
3.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	372.456.930	372.456.930	0
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.817.790	50.817.790	0
3.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	227.262.000	227.262.000	0
3.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.377.140	94.377.140	0
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.766.388.073	7.194.342.163	427.954.090
4.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.999.820	69.999.820	0
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.999.910	34.999.910	0
4.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.999.910	34.999.910	0
4.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.267.542.793	3.267.542.793	0
4.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.999.910	34.999.910	0
4.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.232.542.883	3.232.542.883	0

4.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.049.644.690	2.100.919.500	51.274.810
4.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.999.520	149.999.520	0
4.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	149.999.960	149.999.960	0
4.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.996.900	9.996.900	0
4.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	99.993.080	175.267.890	75.274.810
4.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.189.691.000	989.691.000	200.000.000
4.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.969.600	229.969.600	20.000.000
4.3.7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	199.994.630	395.994.630	196.000.000
4.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	644.635.020	769.435.020	124.800.000
4.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.235.020	251.235.020	90.000.000
4.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	458.400.000	478.200.000	19.800.000
4.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	40.000.000	15.000.000
4.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.982.950	486.862.230	251.879.280
4.5.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.994.950	154.250.230	19.255.280
4.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	200.000.000	200.000.000
4.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.988.000	132.612.000	32.624.000
4.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.582.800	499.582.800	0
4.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.964.600	199.964.600	0
4.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	0
4.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.618.200	99.618.200	0
5.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.263.113.961	853.456.851	1.409.657.110
5.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.263.113.961	853.456.851	1.409.657.110

5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.263.113.961	853.456.851	1.409.657.110
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	99.999.990	99.999.990	0
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	99.999.990	99.999.990	0
6.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	99.999.990	99.999.990	0
TOTAL		9.601.954.284	8.724.754.284	877.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 semula Pagu Anggarannya sebesar Rp. 9.601.954.284,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) selanjutnya sesudah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi hanya Rp. 8.724.754.284,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau mengalami pengurangan sebesar Rp. 877.200.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Jadi berdasarkan Pagu Anggaran yang berkurang tersebut dengan Pencapaian Kinerja atas Target Kinerja yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melampaui Target yang ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 telah efektif dan efisien dalam pengelolaan anggarannya.

Berdasarkan data di atas maka Pagu Anggaran Program yang mendukung Pencapaian Kinerja Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN sebelum dan sesudah Perubahan Anggaran Keuangan tidak mengalami perubahan atau tetap. Sebagian Anggaran Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2

yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebelum dan sesudah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mengalami pengurangan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran semula sebesar Rp. 6.766.388.073 berubah menjadi sebesar Rp. 7.194.342.163,- atau berkurang sebesar Rp. 427.954.090,-. Anggaran Program ini mengalami perubahan karena beberapa Anggaran Kegiatan yang mendukung Program ini juga mengalami Perubahan Anggaran, meliputi:
 - 1) Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dari semula sebesar Rp. 2.049.644.690,-. Sesudah Perubahan Anggaran Keuangan menjadi Rp. 2.100.919.500,- atau berkurang sebesar Rp. 51.274.810,- ;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari semula sebesar Rp. 644.635.020,-. Sesudah Perubahan Anggaran Keuangan menjadi Rp. 769.435.020,- atau berkurang sebesar Rp. 124.800.000,-;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari semula sebesar Rp. 234.982.950,-. Sesudah Perubahan Anggaran Keuangan menjadi Rp. 486.862.230,- atau mengalami pengurangan sebesar Rp. 251.879.280,-;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal Pagu Anggarannya semula Rp. 2.263.113.961,- tetapi sesudah Perubahan Anggaran Keuangan Pagu Anggarannya menjadi sebesar Rp. 853.456.851,- atau berkurang sebesar Rp. 1.409.657.110,-;
3. Khusus Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebelum dan sesudah Perubahan Anggaran Keuangan Pagu anggarannya tetap yaitu sebesar Rp. 99.999.990,-.

Berdasarkan Capaian Kinerja atas Target Kinerja yang ditetapkan

sebelumnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dapat dikatakan efektif. Hal ini berarti Capaian Kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 melampaui Target Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 155,71 %. Capaian Kinerja Efektif tersebut dicapai pada IKU yakni Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN sebesar 155,71 % (Efektif) dan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar 100,09 %.

Capaian Kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dikatakan Efektif dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Tingkat Efektivitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS SKPD	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. Trilyun	4,20	6,54	155,71%	Efektif
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	90,00	90,09	100,10%	Efektif

Keterangan: ≥ 100 = Efektif dan < 100 = Tidak Efektif;

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dapat diukur dengan melihat Capaian Kinerja Fisik dan Capaian Kinerja Keuangan. Berdasarkan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Fisik dan Kinerja Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dapat dikatakan efisien atau di atas 20,00%. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	EFISIENSI (f) $\frac{(6x5)-7}{100} \times (6x5)$	KET.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. Trilyun	4,50	6,54	1,45	576.955.280,-	385.741.285,-	54,00 %	Efisien
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	90,00	90,09	1,00	8.147.799.004,-	6.972.714.402,-	14,51%	Efisien

Keterangan: Batas Maksimal 20% dan Batas Minimal -20%

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dapat diukur dengan melihat Capaian Kinerja Fisik dan Capaian Kinerja Keuangan. Berdasarkan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Fisik dan Kinerja Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dapat dikatakan efisien atau di atas 20,00 %. Jadi Tingkat Efisiensi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN sebesar 54,00 % (Efisien) dan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar 14,51 % (Efisien).

2.1.2 Capaian Renstra

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi tersebut mendukung Pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Misi Nomor 1 yang berbunyi “Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan”
2. Misi Nomor 5 yang berbunyi “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha”

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Visi dan Misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dikerangkai dalam sebuah Tujuan dan Sasaran yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selama periode Tahun 2021 sampai dengan 2026. Dalam melaksanakan Misi yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai tujuan yang harus dicapai. Adapun Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi;

Adapun Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Pencapaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selama Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu Mengungkit Produktivitas Sektor Unggulan dan menguatkan Ketahanan Lingkungan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah
2.	Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran, Formulasi serta Target Indikator Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.12
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET INDIKATOR SASARAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dalam Satu Tahun Anggaran	Rp. 4,5 Trilyun	Rp. 4,3 Trilyun	Rp. 4,4 Trilyun	Rp. 4,5 Trilyun	Rp. 4,6 Trilyun	Rp. 4,8 Trilyun

2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90,00 %	90,50%	91,00%	91,50%	92,00 %	92,50 %
----	---	---	---	--	---------	--------	--------	--------	---------	---------

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Target Indikator Sasaran Strategis untuk Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA Dan PMDN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4,5 Trilyun, sedangkan Target Indikator Sasaran untuk Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi yaitu Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar 90,00 %.

Hasil Capaian Kinerja atas Tujuan (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA Dan PMDN pada Tahun Anggaran 2021 dan Tujuan (2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi yaitu Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Investasi Daerah
Tahun 2021

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. Trilyun	4,00	4,20	105.00	4,50	6,54	145,33
Rata-Rata Capaian Kinerja					105.00			145,33

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Investasi Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis Realisasi Investasi PMA dan PMDN oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar 105,00%

atau Baik Sekali, sedangkan Tahun 2021 yaitu sebesar 145,33%.

Tabel 2.14
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi
Tahun 2021

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen (%)	89,00	91,01	102,26	90,00	90,50	100,10
Rata-Rata Capaian Kinerja					102,26			100,10

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 102,26 % atau Baik Sekali, sedangkan Tahun 2021 sebesar 100,10 %.

2.1.3 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, bahwa mulai tanggal 6 Oktober 2017 pelayanan penanaman modal (perizinan) diselenggarakan atau dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik secara terintegrasi dibawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Pada Tahun 2021 Mal Pelayanan Publik Banyuwangi telah menyelenggarakan pelayanan sebanyak 275 jenis pelayanan publik. Selain Mal Pelayanan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi tepat pada tanggal 22 April 2019 juga telah meresmikan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng dan pada Tanggal 19 Desember

2019 juga telah mengoperasionalkan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Rogojampi yang mampu melayani sebanyak 98 jenis pelayanan publik. Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng dan Kecamatan Rogojampi merupakan bentuk Mini Mal yang merupakan Unit Layanan Publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memberikan akses layanan publik dan mendekatkan layanan kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi sehingga memenuhi harapan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih cepat dan mudah.

Penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi dan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng. Pelayanan perizinan diselenggarakan dengan mengimplementasikan pelayanan perizinan melalui Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan Non Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Adapun Rekapitulasi Jumlah Dokumen Perizinan melalui Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 2.479 Dokumen. Sedangkan Rekapitulasi Jumlah Dokumen Perizinan melalui Non Aplikasi OSS-RBA yang Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2021, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15

Rekapitulasi Jumlah Dokumen Perizinan yang Diterbitkan melalui Non Aplikasi OSS-RBA oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2021

NO.	JENIS PERIZINAN	BULAN TAHUN 2022	
		JANUARI	FEBRUARI
1.	[2] Surat Keterangan Penelitian (SKP)	60	9
2.	[8] Izin Pemasangan Reklame Non Tinjau Lokasi (IRTARA)	55	100
3.	[23] Izin Praktik Bidan (SIPB)	20	18
4.	[37] Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)	0	1
5.	[84] Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	2	76

6.	[87] Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	0	6
7.	[69] Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi (SIP)	0	21
8.	[74] Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	0	12
9.	[90] Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	0	5
10.	[79] Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	0	1
11.	[71] Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	2	0
12.	[78] Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK PEREKAM MEDIS)	0	1
13.	[80] Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	0	2
JUMLAH		139	252

Berdasarkan Data di atas, diketahui bahwa Jumlah Jenis Perizinan Non OSS-RBA yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada periode bulan Januari 2022 sebanyak 139 Dokumen dan bulan Pebruari 2022 sebanyak 252, jadi mengalami penambahan sebanyak 252 Dokumen atau mengalami peningkatan sebanyak 113 Dokumen. Meski mengalami peningkatan tetapi belum dijelaskan apakah dokumen perizinan yang telah diterbitkan tersebut telah sesuai dengan waktu dalam Standar Pelayanan Perizinan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi terkendala oleh beberapa permasalahan, antara lain:

1. Kelembagaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi:

Kelembagaan MPP tidak diatur secara jelas di dalam:

- a. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- d. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
- f. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Kelembagaan MPP yang belum diatur tersebut mengakibatkan Pengelola MPP tidak dapat berfungsi optimal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan prinsip komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan unit teknis terkait lainnya termasuk menghitung kebutuhan anggaran yang dibutuhkan (MPP Kabupaten Banyuwangi bukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah/ SKPD)

2. Sistem Pelayanan Perizinan:

Aplikasi OSS-RBA merupakan Aplikasi Perizinan berbasis Teknologi dan Informasi yang baru dan kompleks dalam implementasinya, sehingga diperlukan:

- a. Penyusunan Regulasi (Perda dan Perbup) pendamping/penguat dalam rangka penerbitan perizinannya;
- b. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi OSS-RBA secara masif dan berkala termasuk pendampingan kepada seluruh stakeholder terutama pelaku usaha atau masyarakat;
- c. Peningkatan Profesionalisme SDM atau Petugas Layanan dalam rangka memberikan Pelayanan Perizinan melalui Aplikasi OSS-RBA dan Aplikasi Non OSS-RBA;
- d. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Perizinan melalui Aplikasi OSS-RBA dan Aplikasi Non OSS-RBA yang mudah diakses oleh publik;

- e. Membangun dan Mengembangkan khususnya Aplikasi atau Sistem Pelayanan Perizinan Non OSS-RBA;
- f. Pengelolaan Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan Perizinan (Klinik Investasi dan Rumah LKPM);
- g. Pemberian Penghargaan dan Hukuman bagi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Program dan Kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, meliputi:

- a. Mengusulkan Perda dan Perbup pendamping/penguat dalam rangka penerbitan perizinan melalui aplikasi OSS-RBA dan Non OSS-RBA;
- b. Melakukan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi OSS-RBA secara masif dan berkala termasuk pendampingan kepada seluruh stakeholder terutama pelaku usaha atau masyarakat;
- c. Peningkatan Profesionalisme SDM atau Petugas Layanan dalam rangka memberikan Pelayanan Perizinan melalui Aplikasi OSS-RBA dan Aplikasi Non OSS-RBA melalui Bimbingan Teknik Layanan berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi;
- d. Menyusun Proses Bisnis Pelayanan Perizinan di MPP Kabupaten Banyuwangi;
- e. Membangun Ruang Lounge MPP Kabupaten Banyuwangi dalam rangka penyajian data perizinan secara real time;
- f. Membangun dan Mengembangkan aplikasi layanan yang mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan di MPP Kabupaten Banyuwangi;
- g. Melakukan revitalisasi terkait aspek-aspek pelayanan di MPP Kabupaten Banyuwangi, antara lain:
 - 1) Aspek Kebijakan Publik;
 - 2) Aspek Profesionalisme SDM (Petugas Layanan);
 - 3) Aspek Sarana Prasarana Pendukung Layanan;
 - 4) Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
 - 5) Aspek Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan;

- 6) Aspek Inovasi Pelayanan Publik.
- h. Menyusun Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten sehingga seluruh personal dapat berkontribusi secara maksimal setelah diberlakukannya penyetaraan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional.

2.1.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

1. Perlu peningkatan optimalisasi pengetahuan dan keterampilan SDM pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
2. Kurang tersosialisasinya peraturan di bidang perizinan dan non perizinan serta penanaman modal secara masif atas regulasi yang begitu cepat berubah;
3. Belum terintegrasinya standar pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
4. Belum optimalnya implementasi atas tersusunnya regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
5. Belum terbentuknya tim fasilitas percepatan dari pengembangan kawasan industri terpadu;
6. Belum optimalnya Implementasi Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Komunikasi, Koordinasi dan Sinkronisasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

terkait dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;

2. Implementasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pedoman penyelenggaraan PTSP;
3. Pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia/ petugas pelayanan yang masih belum optimal terutama kompetensi terkait dengan pelayanan berbasis teknologi informasi;
4. Masih belum dibentuknya tim di Tingkat Kabupaten untuk mendorong percepatan pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi;
5. Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi.

Beberapa solusi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut, antara lain

1. Membangun kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan cara melakukan pertemuan secara berkala dan berkelanjutan;
2. Melakukan penyempurnaan mulai dari aspek kelembagaan, SDM dan mekanisme pelayanan, Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mengirim pegawai untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis tentang sistem pelayanan berbasis teknologi informasi;
4. Memberikan telaahan staf terkait pentingnya dibentuknya tim percepatan pengelolaan kawasan industri di Banyuwangi;
5. Segera mengusulkan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi.

2.1.5 Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama 5 (lima) Tahun yakni *“Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah”* Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yakni:

1. *Misi Nomor 1* yang berbunyi “Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.”
2. *Misi Nomor 5* yang berbunyi “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha”

Berdasarkan telaahan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di atas maka Sasaran Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yang berhubungan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan;
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa.

Selanjutnya seluruh pengelolaan Program dan Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi diarahkan pada penyelesaian Permasalahan Isu-Isu Strategis tersebut. Sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) penunjang pada RKPD Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Realisasi Investasi PMA dan PMDN;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Adapun Capaian Target Indikator Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja, yakni Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal dengan target sebesar 95,00 % dan Persentase Penyampaian LKPM dengan target sebesar 17,00 %. Pada Tahun Anggaran 2021 Program ini tidak dilaksanakan sehingga 2 (Dua) Indikator Kinerja tersebut tidak dapat diukur dan tidak diketahui Capaian Kinerjanya;
2. Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Jumlah Minat Penanaman Modal sebesar Rp. 3,00 Trilyun. Pada Tahun Anggaran 2021 Program ini juga tidak dilaksanakan sehingga Indikator Kinerja tersebut tidak dapat diukur dan tidak diketahui Capaian Kinerjanya;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Persentase Kesuaian Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP sebesar 95,00 %. Pada Tahun Anggaran 2021 Program ini dilaksanakan dan diketahui bahwa Realisasi Kinerjanya sebesar 77,10 % sehingga Capaian Indikator Kinerja tersebut dapat diukur, yaitu sebesar 86,16 %.

Capaian Target Indikator RKPD dalam RPJMD Tahun 2016-2021 pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Capaian Indikator RKPD Tahun 2021 (RPJMD Tahun 2021-2026)

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Penanaman Modal						
1.	Program Pengembangan Data dan Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	95,00	-	-
2.	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	Rp. Trilyun	3,00	-	-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kesuaian Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP	%	95,00	77,10	86,16

2.2 Penelaahan Usulan Program

Sebagai tindak lanjut dari Target Kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, maka sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, maka mengusulkan Program guna mendukung tercapainya Target Kinerja tersebut. Adapun Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2023 akan lebih mengoptimalkan lagi pengelolaan anggaran khususnya Program Pelayanan Penanaman Modal, yang didalamnya tentang pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu.

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan dan melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan di Mal Pelayanan Publik sehingga dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Melalui kegiatan fasilitasi pelayanan publik terpadu diharapkan Pelayanan Penanaman Modal bidang perizinan dan non perizinan dapat dilaksanakan lebih cepat, lebih tepat, lebih murah dan benar di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Sasaran Strategis yang berhubungan dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Kabupaten terhadap Renstra Perangkat Daerah
Provinsi dan Renstra Kementerian/ Lembaga

NO.	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SASARAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
1.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Berkualitas	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal melalui Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Layanan sampai Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima dan Responsif melalui PTSP Pusat dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Sistem Informasi Penanaman Modal yang Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kinerja Lembaga melalui Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Aparat Yang Mumpuni dalam rangka Menunjang Tugas dan Fungsi BKPM Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Promosi dan Kerjasama	Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal Melalui Promosi yang Terpadu dan Efektif Bagi Penanam Modal dalam dan Luar Negeri yang Berpijak pada Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
				Meningkatnya Kerjasama Internasional untuk Mendorong Investasi dan Melindungi Kepentingan Nasional dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Potensi dan Peluang Investasi yang Berdaya Saing	Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Rekomendasi Kebijakan yang Terintegrasi, Kolaboratif dan Implementatif dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal pada Sektor Prioritas

Memperhatikan tabel di atas, maka dapat diketahui terdapat Keterkaitan Sasaran Strategis dalam Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (Renstra Perangkat Daerah Kabupaten) dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Renstra Perangkat Daerah Provinsi) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau BKPM RI (Renstra Kementerian/Lembaga).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah Melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal yaitu Menyusun, Melaksanakan dan Menetapkan Kebijakan Daerah di Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah serta Rencana Strategis Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, mempunyai fungsi, yaitu:

1. Merumuskan dan Menetapkan, Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal serta Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
2. Melakukan Pengkoordinasian, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021-2026 telah ditetapkan beberapa Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi.

Tujuan tersebut berkaitan langsung dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang berdampak pada Penurunan Kemiskinan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan.

Selanjutnya Sasaran Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Meningkatnya Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut berkaitan dengan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yakni:

1. Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Pada Layanan sampai Desa.

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi guna mencapai sasaran-sasaran tersebut, yaitu:

1. Mendorong Percepatan Pengelolaan Kawasan Strategis dan Potensi Unggulan Daerah;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kedua strategi tersebut berkaitan dengan strategi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu: Efektivitas Modal Investasi melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Padat Karya sebagai Tumpuan Utama Pembangunan. Agar dapat melaksanakan Strategi yang telah ditetapkan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi menyusun Kebijakan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kegiatan Promosi Investasi di Tingkat Provinsi dan Nasional;
2. Penyempurnaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal atau Berinvestasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Percepatan Penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi;
4. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi Petugas Layanan atau Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Pengadaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Penanaman Modal yang dapat mendukung kelancaran layanan;
6. Peningkatan Kebijakan Publik termasuk Penyempurnaan Standar Pelayanan secara berkala dan rutin;
7. Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
8. Peningkatan Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat;
9. Berusaha secara terus menerus menciptakan inovasi layanan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas yang signifikan terutama di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi, Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng dan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Rogojampi.

Target Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Target Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 4,40 Trilyun
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	91,00 %

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, maka telah mengusulkan beberapa Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019. Adapun Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada tahun Anggaran 2023:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 6 Kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik;

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan dan Mesin Lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota, dengan 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota;
3. Program Promosi Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Sub Keegiatannya yaitu Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Guna memaksimalkan pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banyuwangi Tahun Anggaran 2023, maka telah mengusulkan perubahan anggaran pada beberapa Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Adapun Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2023 seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan yang Diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.591.977.903
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.257.542.883
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.232.542.883
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.000.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.510.000.000
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.400.000.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	764.435.020
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.235.020
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	508.200.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0

2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	50.000.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	50.000.000
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	50.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	50.000.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	794.000.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	794.000.000
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	794.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	0
2.18.05.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0
JUMLAH		6.485.977.903

Program-Program tersebut merupakan Program-Program yang nantinya dilaksanakan oleh bidang-bidang yang terdapat dalam Struktur Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan Tingkat Capaian Kinerja apakah Tingkat Capaian Kinerja tersebut sesuai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan atau tidak. Adapun indikator masing-masing Program dan Kegiatan (Belanja Langsung) yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Program dan Kegiatan yang Diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2023

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	TARGET KINERJA
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	96,00 %
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	10 Dokumen
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realialisasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen
1.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Disusun	4 Dokumen
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun	12 Laporan
1.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Dikoordinasikan/ Disusun	12 Laporan
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	12 Bulan
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Jenis
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	280.000 Lbr
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lokasi Kebutuhan Komponen Listrik	4 Lokasi
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan

1.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pelaksanaan Rapat di Dalam Daerah maupun Luar Daerah	12 Bulan
1.3.7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Jenis
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Dokumen
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Perkantoran yang Disediakan	4 Dokumen
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4 Dokumen
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun	3 Dokumen
1.5.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas dan Komputer yang Dipelihara	14 Buah
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung yang Dipelihara	1 Unit
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Paket
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun	4 Dokumen
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan	6 Jenis
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	8 Jenis
1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Diadakan	1 Gedung
1.6.4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Diadakan	2 Jenis
2.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENYELESAIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SESUAI DENGAN SOP	95,00 %
2.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan SOP	6.250 Dokumen
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Waktu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	12 Bulan
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PEMENUHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	96,00 %
3.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	5 Laporan
3.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Waktu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	5 Laporan

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	TARGET KINERJA
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROSENTASE PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	7,00 %
4.1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota yang dibuat	1 Dokumen
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota yang Disediakan	1 Dokumen
5.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN MINAT INVESTASI	4,50 %
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan	2 Kegiatan
5.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	2 Kegiatan
6.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA/ PENANAM MODAL TERHADAP PENYAMPAIAN LKPM	65,00 %
6.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Waktu Pengendalian Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	12 Bulan
6.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Dilaksanakan	216 Lokasi
6.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimbingan Teknis Penanaman Modal yang Dilaksanakan	2 Kali
6.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 Kali

Adapun target capaian indikator Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021- 2026 khusus Bidang Urusan Penanaman Modal, sebagai berikut.

Tabel 3.5
Target Capaian Indikator RKPD Tahun 2021 (RPJMD Tahun 2021-2026)

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 (%)
PENANAMAN MODAL				
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	%	7,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	%	4,50
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	%	95,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha/ Penanam Modal terhadap Penyampaian LKPM	%	65,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Data Dan Informasi Penanaman Modal	%	96,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	96,00

3.5 Dana Indikatif dan Sumbernya

Dana indikatif keseluruhan untuk Program dan Kegiatan serta keseluruhan anggaran bagi Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 12.011.000.000,- (Dua Belas Milyar Sebelas Juta Rupiah), secara keseluruhan anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan durasi 1 (satu) Tahun Anggaran, serta memuat Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi berdasarkan urusan yang menjadi Kewenangan Daerah, yakni Urusan Penanaman Modal. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, ini juga memuat sasaran strategis, indikator sasaran, target hasil dan keluaran yang akan dicapai dan dapat diukur kinerjanya serta sumber dana dan rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh Sumber Daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui komitmen dan nilai kebersamaan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, mampu mengelola Program dan Kegiatan di Tahun Anggaran 2023 dengan baik sehingga berdampak langsung secara signifikan terhadap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan juga sebagai pengarah bagi semua unsur kekuatan dan faktor penentu keberhasilan untuk mewujudkan strategi yang paling tepat dalam mencapai tujuan dan strategis penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi di Tahun

Anggaran 2023. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 juga diharapkan sebagai panduan untuk menggerakkan seluruh kebijakan yang diambil guna mencapai target-target kinerja sasaran strategis didasarkan sumber daya yang tersedia sehingga target-target tersebut dapat tercapai sebagaimana yang ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan berdampak langsung peningkatan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi setiap Tahun Anggaran. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 ini, dapat disusun tepat waktu, dengan harapan ada masukan atau saran dari semua pihak yang terkait demi kesempurnaannya.

Banyuwangi, 26 Juli 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI

PARTANA, S.AP, M.Si

Pembina

NIP. 19710120 199403 1 004

**POKOK POKOK KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023**

Pokok - Pokok Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal;
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Unit Penyelenggara Layanan Penanaman Modal;
3. Percepatan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi;
4. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM/ Pegawai/ Petugas Layanan Penanaman Modal;
5. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal;
6. Peningkatan Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pengaduan/ Konsultasi Layanan Penanaman Modal;
7. Peningkatan dan Pengelolaan Inovasi Layanan Penanaman Modal.

Adapun Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Mendorong Percepatan Pengelolaan Kawasan Strategis dan Potensi Unggulan Daerah di Kabupaten Banyuwangi;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Banyuwang, 26 Juli 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI

PARTANA, S.AP, M.Si

Pembina

NIP. 19710120 199403 1 004



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA

RENJA

2024

Jalan Jendral Ahmad Yani No.100 Banyuwangi 68416
Telpon : (0333) 425001-425011 Faks (0333) 428500
Email : setda@banyuwangikab.go.id
website : www.banyuwangikab.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Berkat Ridho Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024. Berkat kerja sama seluruh pegawai dan arahan pimpinan di Dinas Penanaman Modal dan (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan pengelolaan Program dan Kegiatan oleh seluruh pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun dalam rangka mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Dokumen Renja ini, bermanfaat bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dan pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi tentang Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 yang disusun ini dirasa belum sempurna, untuk itu perlu kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Demikian Renja ini disusun dan tidak lupa disampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin dengan semua pihak yang terkait.

Banyuwangi, 08 Maret 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



PARTANA, S.AP., M.Si.
Pembina

NIP. 19720120 199403 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii-iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	8
2.1 Evaluasi Renja dan Capaian Renstra	8
2.1.1 Evaluasi Renja Tahun 2021	8
2.1.2 Capaian Renstra	34
2.1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	39
2.1.4 Review terhadap RKPD	41
2.2 Penelaahan Usulan Program	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	43
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	44
3.3 Program dan Kegiatan	47
3.4 Indikator Kinerja	50
3.5 Dana Indikatif dan Sumbernya	53
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	
Pokok Pokok Kebijakan dan Strategi Dinas Penanaman Modal dan	
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja Berdasarkan Skala Ordinal.....	9
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022	10
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dan 2022	11
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dibanding dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur	12
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dibanding dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI/ Nasional	13
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Masing-Masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022	15
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Masing-Masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022	18
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022	22
Tabel 2.9 Jumlah Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2022	24
Tabel 2.10 Tingkat Efektivitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022	33
Tabel 2.11 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022	34

		Halaman
Tabel 2.12	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026	36
Tabel 2.13	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026	36
Tabel 2.14	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Investasi Daerah Tahun 2022	37
Tabel 2.15	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi Tahun 2022	38
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun ini disbanding dengan Target Kinerja Jangka Menengah pada Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 -2026	39
Tabel 3.1	Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/ Lembaga	43
Tabel 3.2	Keterkaitan Tujuan, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026	46
Tabel 3.3	Target Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023	47
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan yang Diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023	48
Tabel 3.5	Program dan Kegiatan yang Diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023	50
Tabel 3.6	Target Capaian Indikator RKPD Tahun 2021 (RPJMD Tahun 2021-2026)	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman atau acuan yang dipakai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi juga berisi tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026. Sebagaimana diketahui bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 perlu disusun. Hal ini mengingat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 baik tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun ke depan. Rencana Kerja Awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini juga diharapkan sudah mengakomodasi beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi di Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
12. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

14. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penganganan Pandemi Corona Virus dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025;

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
46. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
49. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
50. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
51. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/743/KEP/429.011/2022 tentang Program Inovasi Mal Pelayanan Publik Digital.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024, yaitu sebagai Pedoman atau Acuan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan Guna Tercapainya Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dan dalam rangka Mendukung Terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika

Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi Gambaran Umum Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang menggambarkan pengertian tentang Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja), keterkaitan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2021-2026 serta tindak lanjut dengan proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banyuwangi, memuat peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, memuat penjelasan maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja serta susunan garis besar isi dokumen.

- BAB II** : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, yang mengacu pada Hasil Laporan Kinerja Tahunan atau Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022, Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
- BAB III** : Bab ini berisi tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Bab ini juga memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi yaitu penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional serta hal-hal yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi serta Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
- BAB IV** : **Penutup**, bab ini berisi catatan penting yang mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tidak lanjut Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi di Tahun Anggaran 2024.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021-2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi menggambarkan Tingkat Pencapaian Sasaran, Indikator Sasaran serta Tingkat Pencapaian masing-masing Program dan Kegiatan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi juga menginformasikan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

Secara umum berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026. Diketahui terdapat 2 (Dua) Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2022, yaitu:

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah;

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi.

Sedangkan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022, yaitu:

- 1) Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN;
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi diperoleh berdasarkan pengukuran atas capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Kesimpulan Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dilakukan dengan membuat Rata-Rata atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022. Adapun Predikat Nilai Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, didasarkan pada Skala Pengukuran Ordinal di bawah ini.

Tabel 2.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja Berdasarkan Skala Ordinal

NO.	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	> 100 %	Baik Sekali
2.	> 75 - 100 %	Baik
3.	55 - 75 %	Cukup
4.	< 55 %	Kurang

NO.	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	> 85 %	Sangat Berhasil
2.	70 - 85 %	Berhasil
3.	55 - 69 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Tidak Berhasil

Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2022 Tidak Dilakukan Pengukuran sehubungan Tidak Ditetapkan untuk Target Indikator Tujuan sebelumnya,

sehingga Analisis Capaian Kinerjanya juga tidak dapat disusun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 hanya dapat mengetahui Capaian Indikator Kinerja Utama pada Indikator Sasaran Strategis (IKU Sasaran Strategis) sehubungan telah ditetapkan Besaran untuk Target Indikator Sasaran Strategis sebelumnya. Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	IDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun (Rp)	4,60	3,73	81,09
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen (%)	90,50	90,52	100,02

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar **81,09 %** (belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya) atau **“Baik”** berdasarkan Skala Pengukuran Ordinal.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kineja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **100,02 %** (melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya) atau **“Baik Sekali”** berdasarkan Skala Pengukuran Ordinal.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun yang Lalu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dan 2022

NO.	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun (Rp)	4,50	1,73	38,44	4,60	3.73	81,09
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen (%)	90,00	90,09	100,10	90,50	90,52	100,02

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2021 sebesar 38,44 % (Kurang) sedangkan Capaian Kinerja pada Tahun 2022 yaitu sebesar 81,09 % (Baik). Jadi apabila dibandingkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2022 sebesar 81,09 % (Baik) lebih baik dibanding Tahun 2021 sebesar 38,44 % (Kurang) atau mengalami peningkatan sebesar 42,65 %.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kineja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 sebesar 100,02 (Baik

Sekali) sedangkan pada Tahun 2021 sebesar 100,10 % atau mengalami penurunan sebesar 0,08 %. Jadi Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meskipun pada Tahun 2022 telah melampaui target yang telah ditetapkan tetapi apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 Capaian Kinerja tersebut lebih rendah atau turun sebesar 0,08 %.

Perbandingan Capaian Kinerja khusus Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dibanding dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur pada 2022

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DPM PTSP KABUPATEN BANYUWANGI			CAPAIAN KINERJA DPM PTSP PROVINSI JAWA TIMUR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	(Rp.) Trilyun	4,60	3.73	81,09	80,00	110,33	137,91

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa apabila dibandingkan Capaian Kinerja khusus Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 maka , Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi lebih rendah atau terdapat selisih sebesar 56,82 %.

Perbandingan Capaian Kinerja khusus Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banyuwangi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (Nasional) pada Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dibanding Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI/ Nasional pada Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DPM PTSP KABUPATEN BANYUWANGI			CAPAIAN KINERJA BKPM RI/ NASIONAL		
		TARGET	REALISASI	CAPAIA N KINERJA (%)	TARGE T	REALISASI	CAPAIA N KINERJA (%)
Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	(Rp.) Trilyun	4,60	3.73	81,09	1.200	1.207,20	100,60

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Capaian Kinerja (Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2022 (81,09 %) dan apabila dibandingkan maka Capaian Kinerja Capaian Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal RI/ Nasional (**100,60 %**) maka Capaian Kinerja tersebut lebih rendah atau terdapat selisih yaitu sebesar 19,51 %.

Bedasarkan data Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2022 terdapat 2 (Dua) Capaian Kinerja IKU yaitu:

1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pada Capaian Kinerja IKU yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2022 belum memenuhi sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, adapun analisis penyebab kegagalan antara lain:

- 1) Dampak Pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh dunia sehingga mengganggu kegiatan ekonomi dunia;
- 2) Adanya Peralihan Tabulasi Realisasi Investasi pada Sistem OSS RBA.

Adapun pada Pada Capaian Kinerja IKU yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2022 mengalami peningkatan kinerja, adapun analisis penyebab keberhasilan yaitu peningkatan kinerja kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui aplikasi pelayanan berbasis Teknologi dan Informasi (Digital).

Upaya Perbaikan Kinerja ke depan, yang perlu dilakukan oleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

- 1) Deregulasi yaitu Sinkronisasi, Harmonisasi dan Penyederhanaan Regulasi Daerah terhadap UU Cipta Kerja (*Omnibuslaw*);
- 2) Digitalisasi yaitu Standarisasi, Kodefikasi, Klasterisasi dan Integrasi OSS serta aplikasi lainnya;
- 3) Debirokratisasi yaitu Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Proses Bisnis dan Pendelegasian Kewenangan;
- 4) Peningkatan Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan yaitu melalui Kegiatan Fasilitasi, Asistensi, Supervisi dan Bimbingan Teknis terhadap Kegiatan Investasi (Penanaman Modal).

Inovasi Pendukung yang perlu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi:

1. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Penanaman Modal (Non OSS-RBA);
2. Optimalisasi kinerja pelayanan investasi (pelayanan perizinan dan non perizinan) melalui Penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Daerah.

Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Masing-Masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	KINERJA		
			TARGET FISIK	REALISASI FISIK	%
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI	6,00 %	6,00 %	100,00
1.1	<i>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota yang dibuat</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100,00</i>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Master Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN MINAT INVESTASI	4,00 %	2,67 %	66,67
2.1	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan</i>	<i>3 Kegiatan</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>66,67</i>
2.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA/ PENANAM MODAL TERHADAP PENYAMPAIAN LKPM	60,00 %	56,00 %	93,33
3.1	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Waktu Pengendalian Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>100,00 %</i>	<i>86,00 %</i>	<i>86,00</i>
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN dan UKM yang Di survey	0	0	0

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	KINERJA		
			TARGET FISIK	REALISASI FISIK	%
5.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimbingan Teknis Penanaman Modal yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00
5.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 Kegiatan	430 kegiatan	86,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Indikator Program, Jumlah Minat Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja sebesar 186,86 % (Baik Sekali). Program ini dilakukan melalui 1 Kegiatan, yaitu Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali) dan 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali);
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan Indikator Program, Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan, dengan Capaian Kinerja sebesar 66,67 % (Cukup). Program ini dilakukan melalui 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 66,67 % (Cukup). Kegiatan ini dilakukan melalui 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 66,67 % (Cukup);

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator program, Persentase Penyampaian Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan, dengan Capaian Kinerja sebesar 93,33 % (Baik Sekali). Program ini dilakukan melalui 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 86,00 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 2 Sub Kegiatan, antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali);
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja sebesar 86,00 % (Baik).

Sesuai uraian Capaian Indikator Kinerja masing-masing Program dan Kegiatan di atas maka dalam rangka mengatasi permasalahan belum optimalnya peningkatan pertumbuhan nilai realisasi investasi yang signifikan di Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan, antara lain:

1. Percepatan penetapan Kawasan Industri melalui penetapan Peraturan Daerah kabupaten Banyuwangi;
2. Percepatan Penetapan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Melakukan Percepatan revisi Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dan Percepatan Peraturan Bupati sebagai regulasi turunannya;
4. Percepatan Penyusunan dan Pemanfaatan secara Optimal Peta Potensi Unggulan melalui Peraturan Bupati Banyuwangi;
5. Mengoptimalkan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan promosi investasi.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Dokumen Ranwal Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Banyuwangi Tahun 2024| 17

Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Masing-Masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	KINERJA		
			TARGET FISIK	REALISASI FISIK	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	95,00 %	85,45 %	89,95
1.1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realialisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
1.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Panganggaran Perangkat Daerah yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	100,00 %	100,00 %	100,00
1.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Dikoordinasikan/ Disusun	12 Laporan	12 Laporan	100,00
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Cakupan Umum Perangkat Daerah	100,00 %	159,70 %	159,70
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Jenis	48 Jenis	102,13
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60.606 Lbr	70.459 Lbr	99,76
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis	100,00
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Listrik	12 Komponen	12 Komponen	100,00

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	KINERJA		
			TARGET FISIK	REALISASI FISIK	%
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pelaksanaan Rapat di Dalam Daerah maupun Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.3.7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Jenis	27 Jenis	108,00
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	97,20 %	97,20
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Perkantoran yang Disediakan	288 OB	270 OB	93,75
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100,00	117,66	117,66
1.5.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	403 Jenis	156 Jenis	38,71
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Gedung yang Dipelihara	15 Paket	34 Paket	226,67
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	403 Jenis	353 Jenis	87,59
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	37 Unit	37 Unit	100,00
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer, Laptop dan Printer yang Diadakan	18 Unit	18 Unit	100,00
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung yang Diadakan	7 Unit	7 Unit	100,00
1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang Diadakan	10 Unit	10 Unit	100,00
1.6.4	Sub Kegiatan Pengadaan mebelair	Jumlah Mebelair yang Diadakan	2 Unit	2 Unit	100,00

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	KINERJA		
			TARGET FISIK	REALISASI FISIK	%
2.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Kesesuaian Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP</i>	95,00 %	96,11 %	101,17
2.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan SOP	3.500 Dokumen	3.364 Dokumen	96,11
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Waktu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal</i>	95,50 %	95,50 %	100,00
3.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	12 Bulan	12 Bulan	100,00
3.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Waktu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	12 Bulan	12 Bulan	100,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Program-Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Indikator Program, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah, Capaian

Kinerjanya sebesar atau 89,95 % (Baik). Program ini dilakukan melalui 6 (Enam) Kegiatan, yang meliputi:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 Sub Kegiatan;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 Sub Kegiatan;
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 159,70 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 7 Sub Kegiatan;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 97,20 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 117,66 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan;
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP, dengan Capaian Kinerja sebesar 101,17 % (Baik Sekali). Program ini dilaksanakan melalui 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 96,11 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 1 Sub Kegiatan yakni Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Indikator Program, dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 1 Sub Kegiatan yakni Sub Kegiatan Pengolahan,

Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00 % (Baik Sekali).

Laporan Kinerja Keuangan (Realisasi Keuangan) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, memberikan Gambaran Penilaian Tingkat Pencapaian Target Realisasi Anggaran Sasaran dari masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengukuran Kinerja Keuangan yang digunakan untuk Menilai Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian Kinerja Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	49.999.800	46.673.800	93,35
1.1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	49.999.800	46.673.800	93,35
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	49.999.800	46.673.800	93,35
2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	89.999.400	59.755.325	66,40
2.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	89.999.400	59.755.325	66,40
2.1.1	Sub Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	89.999.400	59.755.325	66,40
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	383.913.800	277.866.400	72,38
3.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	383.913.800	277.866.400	72,38
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0
3.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	280.952.900	219.146.400	78,00
3.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.960.900	58.720.000	57,03

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.503.920.909	10.199.829.571	88,66
4.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.999.900	46.789.700	66,84
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	23.401.500	66,86
4.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.999.900	23.388.200	66,82
4.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.124.248.799	3.206.038.754	77,74
4.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.999.700	34.500.900	98,57
4.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.089.249.099	3.171.537.854	77,56
4.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.992.628.500	1.840.780.549	92,38
4.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.999.300	124.288.050	82,86
4.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	161.619.200	99.409.100	61,51
4.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.996.000	9.774.000	97,78
4.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	99.998.800	99.708.000	99,71
4.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.016.174.500	972.800.250	95,73
4.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.902.500	186.241.149	90,89
4.3.7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	349.938.200	348.560.000	99,61
4.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.055.722.800	909.122.410	86,11
4.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	507.522.800	412.077.410	81,19
4.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	508.200.000	477.600.000	93,98
4.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	19.445.000	48,61
4.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.604.025.300	2.546.661.458	97,80
4.5.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.539.300	122.100.500	74,21
4.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.239.500.000	2.232.620.958	99,69
4.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.986.000	191.940.000	95,98
4.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.657.295.610	1.650.436.700	99,59
4.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebelair	73.288.600	73.000.000	99,60
4.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.698.410	198.650.000	99,48
4.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.125.000.000	1.122.192.500	99,75
4.6.4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	259.308.600	256.594.200	98,95

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
5.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	974.750.950	821.362.389	84,26
5.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	974.750.950	821.362.389	84,26
5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	974.750.950	821.362.389	84,26
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000	99.456.000	99,46
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	99.456.000	99,46
6.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000	99.456.000	99,46
TOTAL		13.102.584.859	11.504.943.485	87,81

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Realisasi Anggaran pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 11.504.943.485,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau 87,81 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.102.584.859,- (Tiga Belas Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Program-Program yang mendukung mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 93,35 % (Baik). Program ini dilakukan melalui 1 Kegiatan, yaitu Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 93,35 % (Baik) dan 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 93,35 % (Baik);

2. Program Promosi Penanaman Modal dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 66,40 % (Cukup). Program ini dilakukan melalui 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 66,40 % (Cukup). Kegiatan ini dilakukan melalui 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 66,40 % (Cukup);
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 72,38 % (Cukup). Program ini dilakukan melalui 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 72,38 % (Cukup). Kegiatan ini dilakukan melalui 2 (Dua) Sub Kegiatan, antara lain:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 78,00 % (Cukup);
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 57,03 % (Kurang).

Jadi Jumlah Total Pagu Anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 523.913.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) sedangkan Total Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 384.295.525,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atas sebesar 73,35 %.

Adapun Program-Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar atau 87,46 % (Baik). Program ini dilakukan melalui 6 (Enam) Kegiatan, yang meliputi:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 66,84 % (Cukup). Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 Sub Kegiatan;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 77,74 % (Baik). Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 Sub Kegiatan;
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 89,09 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 7 Sub Kegiatan;
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 86,11 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan;
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 97,80 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan;
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 95,18 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 3 Sub Kegiatan;

2. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Indikator Program, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 80.58 % (Baik). Program ini dilaksanakan melalui 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 80.58 % (Baik). Kegiatan ini dilakukan melalui 1 Sub Kegiatan yakni Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 99,46 % (Baik Sekali). Program ini dilakukan

Dokumen Ranwal Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Banyuwangi Tahun 2024 | 26

melalui 1 Kegiatan yakni Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan Capaian Kinerja Keuangannya sebesar 99,46 % (Baik Sekali). Kegiatan ini dilakukan melalui 1 Sub Kegiatan yakni Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Jadi Jumlah Total Pagu Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp. 12.578.671.859,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) sedangkan Total Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 10.982.197.960,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 87,31 %.

Jumlah Anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, sebelum dan sesudah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) juga dapat menggambarkan kinerja efektivitas dan efisiensi atas pengelolaan anggaran dan capaian kinerja yang didapatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022. Jumlah Anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 sebelum dan setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) secara rinci, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.9

Jumlah Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2022

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	PAGU ANGGARAN SEBELUM PAK (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK (Rp.)	TAMBAH/ KURANG (Rp.)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	49.999.800	49.999.800	0
1.1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	49.999.800	49.999.800	0

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	PAGU ANGGARAN SEBELUM PAK (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK (Rp.)	TAMBAH/ KURANG (Rp.)
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	49.999.800	49.999.800	0
2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	89.999.400	89.999.400	0
2.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	89.999.400	89.999.400	0
3.1.1	Sub Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	89.999.400	89.999.400	0
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	383.913.800	383.913.800	0
3.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	383.913.800	383.913.800	0
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0
3.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	280.952.900	280.952.900	0
3.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.960.900	102.960.900	0
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.620.210.409	11.503.920.909	883.710.500
4.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.999.900	69.999.900	0
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	35.000.000	0
4.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.999.900	34.999.900	0
4.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.384.248.799	4.124.248.799	740.000.000
4.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.999.700	34.999.700	0
4.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.349.249.099	4.089.249.099	740.000.000
4.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.119.791.000	1.992.628.500	(127.162.500)
4.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.999.300	149.999.300	0
4.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.969.200	161.619.200	61.650.000
4.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.996.000	9.996.000	0
4.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	99.998.800	99.998.800	0

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	PAGU ANGGARAN SEBELUM PAK (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK (Rp.)	TAMBAH/ KURANG (Rp.)
4.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.259.987.000	1.016.174.500	(243.812.500)
4.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.902.500	204.902.500	55.000.000
4.3.7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	349.938.200	349.938.200	0
4.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	898.199.800	1.055.772.800	157.523.000
4.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.999.800	507.522.800	157.523.000
4.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	508.200.000	508.200.000	0
4.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	40.000.000	0
4.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.539.450.100	2.604.025.300	64.575.200
4.5.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.964.100	164.539.300	14.575.200
4.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.189.500.000	2.239.500.000	50.000.000
4.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.986.000	199.986.000	0
4.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.608.520.810	1.657.295.610	48.774.800
4.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebelair	49.306.400	73.288.600	23.982.200
4.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.698.410	199.698.410	0
4.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.200.207.400	1.125.000.000	(75.207.400)
4.6.4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.308.600	259.308.600	100.000.000
5.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	800.357.161	974.750.950	174.393.789
5.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	800.357.161	974.750.950	174.393.789
5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	800.357.161	974.750.950	174.393.789

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	PAGU ANGGARAN SEBELUM PAK (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK (Rp.)	TAMBAH/ KURANG (Rp.)
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000	100.000.000	0
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	100.000.000	0
6.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000	100.000.000	0
TOTAL		12.044.480.570	13.102.584.859	1.058.104.289

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 semula Pagu Anggarannya sebesar Rp. 12.044.480.570,- (Dua Belas Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) selanjutnya sesudah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mengalami penambahan menjadi Rp. 13.102.584.859,- (Tiga Belas Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.058.104.289,- (Satu Milyar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Jadi berdasarkan Pagu Anggaran yang berkurang tersebut dengan Pencapaian Kinerja atas Target Kinerja yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melampaui Target yang ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 telah efektif dan efisien dalam pengelolaan anggarannya.

Berdasarkan data di atas maka Pagu Anggaran Program yang mendukung Pencapaian Kinerja Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN sebelum dan sesudah Perubahan Anggaran Keuangan tidak mengalami perubahan atau tetap. Sebagian Anggaran Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik dengan Indikator

Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebelum dan sesudah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mengalami penambahan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran semula sebesar Rp. 10.620.210.409,- berubah menjadi sebesar Rp. 11.503.920.909,- atau bertambah sebesar Rp. 883.710.500,-. Anggaran Program ini mengalami perubahan karena beberapa Anggaran Kegiatan yang mendukung Program ini juga mengalami Perubahan Anggaran, meliputi:
 - 1) Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari semula sebesar Rp. 3.384.248.799,- Sesudah Perubahan Anggaran Keuangan menjadi Rp. 4.124.248.799,- atau bertambah sebesar Rp. 740.000.000,-;
 - 2) Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dari semula sebesar Rp. 2.119.791.000,- Sesudah Perubahan Anggaran Keuangan menjadi Rp. 1.992.628,- atau berkurang sebesar Rp. 127.162.400,-;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari semula sebesar Rp. 898.199.800,- Sesudah Perubahan Anggaran Keuangan menjadi Rp. 1.055.722.800,- atau bertambah sebesar Rp. 157.523.000,-;
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari semula sebesar Rp. 1.608.520.810,- Sesudah Perubahan Anggaran Keuangan menjadi Rp. 1.657.295.610,- atau mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 48.774.800,-;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari semula sebesar Rp. 2.539.450.100,- setelah Perubahan Anggaran Keuangan menjadi Rp. 2.604.025.300,- atau mengalami penambahan sebesar Rp. 64.575.200,-;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal Pagu Anggarannya semula Rp. 800.357.161,- tetapi sesudah Perubahan Anggaran Keuangan Pagu Anggarannya menjadi sebesar Rp. 974.750.950,- atau bertambah sebesar Rp. 785.428.813,-;

3. Khusus Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebelum dan sesudah Perubahan Anggaran Keuangan Pagu anggarannya tetap yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-.

Berdasarkan uraian masing-masing capaian kinerja program di atas, maka dalam rangka mengoptimalkan kinerja atau kualitas pelayanan penanaman modal yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Banyuwangi untuk mengatasinya perlu dilakukan:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dengan Pola Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP);
2. Melakukan Percepatan Penyesuaian Peraturan Bupati terkait pelayanan penanaman modal yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan regulasi terbaru/ yang berlaku;
3. Melakukan Sosialisasi dan pendampingan secara masif dan berkala kepada masyarakat dan pelaku usaha serta stakeholder terkait;
4. Selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pejabat yang berwenang yang berada di Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga terkait permasalahan pelayanan menggunakan aplikasi pusat (OSS-RBA);
5. Meningkatkan prinsip-prinsip koordinasi, komunikasi dan integrasi antar instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Berdasarkan Capaian Kinerja atas Target Kinerja yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dapat dikatakan tidak efektif pada IKU yakni Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yaitu hanya sebesar 81,09 % (Efektif) sedangkan pada IKU yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar 100,02 %, dapat dikatakan efektif.

Capaian Kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dikatakan Tidak Efektif pada Capaian Kinerja IKU Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan pada IKU

yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dikatakan efektif dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10

Tingkat Efektivitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS SKPD	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. Trilyun	4,60	3,73	81,09 %	Tidak Efektif
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	90,50	95,20	100,02 %	Efektif

Keterangan: ≥ 100 = Efektif dan < 100 = Tidak Efektif;

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dapat diukur dengan melihat Capaian Kinerja Fisik dan Capaian Kinerja Keuangan. Berdasarkan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Fisik dan Kinerja Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dapat dikatakan efisien atau di atas 20,00 %. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	EFISIENSI (f) $\frac{(6x5)-7}{(6x5)} \times 100 \%$	KET.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. Trilyun	4,60	3,73	0,81	523.913.000,-	384.295.525,-	10,00 %	Efisien
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	90,50	90,52	1,00	12.578.671.859,-	11.120.647.960,-	12,00 %	Efisien

Keterangan: Batas Maksimal 20% dan Batas Minimal -20%

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dapat diukur dengan melihat Capaian Kinerja Fisik dan Capaian Kinerja Keuangan. Berdasarkan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Fisik dan Kinerja Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 ternyata efisien. Artinya Tingkat Efisiensi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN sebesar 10,00 % (Efisien) dan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar 12,00 % (Efisien).

2.1.2 Capaian Renstra

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi tersebut mendukung pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Misi Nomor 1 yang berbunyi “Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan

Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan”

2. Misi Nomor 5 yang berbunyi “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha”

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Visi dan Misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dikerangkai dalam sebuah Tujuan dan Sasaran yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selama periode Tahun 2021 sampai dengan 2026. Dalam melaksanakan Misi yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai tujuan yang harus dicapai. Adapun Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi;

Adapun Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Pencapaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selama Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu Mengungkit Produktivitas Sektor Unggulan dan menguatkan Ketahanan Lingkungan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah
2.	Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran, Formulasi serta Target Indikator Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.13
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET INDIKATOR SASARAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi di Daerah	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMAdan PMDN dalam Satu Tahun Anggaran	Rp. 4,5 Trilyun	Rp. 4,6 Trilyun	Rp. 4,7 Trilyun	Rp. 4,8 Trilyun	Rp. 4,9 Trilyun	Rp. 5,0 Trilyun
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90,00 %	90,50%	91,00%	91,50%	92,00 %	92,50 %

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Target Indikator Sasaran Strategis untuk Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah yaitu

Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 4,6 Trilyun, sedangkan Target Indikator Sasaran untuk Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi yaitu Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar 90,50 %.

Hasil Capaian Kinerja atas Tujuan (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA Dan PMDN pada Tahun Anggaran 2022 dan Tujuan (2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi yaitu Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Investasi Daerah
Tahun 2022

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. Trilyun	4,50	1,73	38,44	4,60	3,73	81,09
Rata-Rata Capaian Kinerja					38,44			81,09

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Investasi Daerah dengan Indikator Sasaran Strategis Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar 38,44 % atau Kurang, sedangkan Tahun 2022 yaitu sebesar 81,09 %.

Tabel 2.15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi
Tahun 2022

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen (%)	90.00	90,09	100.10	90.50	90,52	100.02
Rata-Rata Capaian Kinerja					100.10			100.02

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 100,10 % atau Baik Sekali, sedangkan Tahun 2022 sebesar 100,02 % atau Baik Sekali.

Perbandingan Realisasi Kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2022 untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Target Jangka Menengah sebagaimana yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi atau Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 menunjukkan Capaian Realisasi Kinerja masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Untuk Capaian Kinerja IKU yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN apabila dibandingkan dengan Target Kinerja Jangka Menengah yakni sebesar Rp. 5,00 Trilyun maka Capaian Kinerja pada Tahun 2022 ini (Rp. 3,73 Trilyun) maka hanya sebesar 74,60 % (Cukup);
2. Untuk Capaian Kinerja IKU yaitu Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja

Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yakni sebesar 92,50 % sedangkan pada Tahun 2022 Capaian Kinerjanya sebesar 90,20 maka apabila dibandingkan dengan Target Kinerja Jangka Menengah maka Capaian Kinerja IKU ini sebesar 97,51 % (Baik).

.Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja untuk IKU yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2022 apabila dibandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Target Jangka Menengah maka hanya sebesar 74,60 % (Cukup) sedangkan Capaian Kinerja IKU yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan maka Capaian Kinerja pada Tahun 2022 ini sudah sebesar 90,71 % (Baik). Capaian Kinerja masing-masing IKU yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Target Kinerja Jangka Menengah yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Ini dibanding dengan Target Kinerja Jangka Menengah pada Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN INI (2022)	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA (2021-2026)	KETERANGAN
1.	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun (Rp)	3,73	5,00	74,60 % (Cukup)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen (%)	90,52	92,50	90,71 % (Baik)

2.1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

1. Perlu peningkatan optimalisasi pengetahuan dan keterampilan SDM pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;

2. Kurang tersosialisasinya peraturan di bidang perizinan dan non perizinan serta penanaman modal secara masif atas regulasi yang begitu cepat berubah;
3. Belum terintegrasinya standar pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
4. Belum optimalnya implementasi atas tersusunnya regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
5. Belum terbentuknya tim fasilitas percepatan dari pengembangan kawasan industri terpadu;
6. Belum Optimalnya Implementasi Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Komunikasi, Koordinasi dan Sinkronisasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
2. Implementasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pedoman penyelenggaraan PTSP;
3. Pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia/ petugas pelayanan yang masih belum optimal terutama kompetensi terkait dengan pelayanan berbasis teknologi informasi;
4. Masih belum dibentuknya tim di Tingkat Kabupaten untuk mendorong percepatan pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi;
5. Belum ditetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi.

Beberapa solusi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menyelesaikan beberapa

permasalahan tersebut, antara lain

1. Membangun kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan cara melakukan pertemuan secara berkala dan berkelanjutan;
2. Melakukan penyempurnaan mulai dari aspek kelembagaan, SDM dan mekanisme pelayanan, Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mengirim pegawai untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis tentang sistem pelayanan berbasis teknologi informasi;
4. Memberikan telaahan staf terkait pentingnya dibentuknya tim percepatan pengelolaan kawasan industri di Banyuwangi;
5. Segera mengusulkan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi.

2.1.4 Review terhadap RKPD

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun yakni “Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah” Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yakni:

1. Misi Nomor 1 yang berbunyi “Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.”
2. Misi Nomor 5 yang berbunyi “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha”

Berdasarkan telaahan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di atas

maka Sasaran Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berhubungan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan;
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada Layanan sampai Desa.

Selanjutnya seluruh pengelolaan Program dan Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi diarahkan pada penyelesaian Permasalahan Isu-Isu Strategis tersebut. Sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) penunjang pada RKPD Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2022 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

2.2 Penelaahan Usulan Program

Sebagai tindak lanjut dari target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, maka mengusulkan Program guna mendukung tercapainya target kinerja tersebut. Adapun Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Program Pelayanan Penanaman Modal.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Sasaran Strategis yang berhubungan dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Kabupaten terhadap Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/ Lembaga

NO.	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SASARAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
1.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Berkualitas	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal melalui Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Layanan sampai Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima dan Responsif melalui PTSP Pusat dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Sistem Informasi Penanaman Modal yang Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kinerja Lembaga melalui Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Aparat Yang Mumpuni dalam rangka Menunjang Tugas dan Fungsi BKPM Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Promosi dan Kerjasama	Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal Melalui Promosi yang Terpadu dan Efektif Bagi Penanam Modal dalam dan Luar Negeri yang Berpijak pada Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
				Meningkatnya Kerjasama Internasional untuk Mendorong Investasi dan Melindungi Kepentingan Nasional dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Potensi dan Peluang Investasi yang Berdaya Saing	Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Rekomendasi Kebijakan yang Terintegrasi, Kolaboratif dan Implementatif dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal pada Sektor Prioritas

Memperhatikan tabel di atas, maka dapat diketahui terdapat keterkaitan Sasaran Strategis dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (Renstra Perangkat Daerah Kabupaten) dengan Sasaran Strategis dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Renstra Perangkat Daerah Provinsi) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau BKPM RI (Renstra Kementerian/ Lembaga).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah Melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal yaitu Menyusun, Melaksanakan dan Menetapkan Kebijakan Daerah di Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah serta Rencana Strategis Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka melaksanakan Tugas Pokoknya mempunyai fungsi, yaitu:

1. Merumuskan dan Menetapkan, Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal serta Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
2. Melakukan Pengkoordinasian, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021-2026 telah ditetapkan beberapa Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi.

Tujuan tersebut berkaitan langsung dengan Tujuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Membangun Infrastruktur Tematik untuk Pengembangan Pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya Produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai Penguatan

Investasi, Akses Pasar dan Pendampingan Pelaku Usaha yang Mampu Menyerap Tenaga Kerja Lokal dan tetap Memperhatikan Keseimbangan Lingkungan;

2. Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Dinamis dan Adaptif melalui Reformasi Manajemen Pemerintahan dan Memperkuat Inovasi Pelayanan Keseluruh Layanan sampai Desa yang Berorientasi pada Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah.

Selanjutnya Sasaran Strategis dalam Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut berkaitan dengan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yakni Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Layanan sampai Desa. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi guna mencapai sasaran-sasaran tersebut, yaitu:

1. Mendorong Percepatan Pengelolaan Kawasan Strategis dan Potensi Unggulan Daerah, telah ditetapkan kebijakan, antara lain:
 - 1) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan Promosi Investasi di Tingkat Propinsi dan Nasional;
 - 2) Penyempurnaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi;
 - 3) Percepatan Penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah ditetapkan kebijakan, antara lain:
 - 1) Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) atau Petugas Layanan Pelayanan Penanaman Modal;
 - 2) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana yang Memadai dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal;
 - 3) Penyempurnaan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal;
 - 4) Optimalisasi Pemeliharaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Infomasi Pelayanan Publik (SIPP) baik Elektronik maupun Non Elektronik;

- 5) Peningkatan Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan Penanaman Modal;
- 6) Penyusunan dan Pengembangan Inovasi pelayanan publik.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam RPJMD Perubahan Tahun 2021-2026. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN SKPD	SASARAN SKPD	STRATEGI SKPD	KEBIJAKAN SKPD
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Mendorong Percepatan Pengelolaan Kawasan Industri dan Potensi Unggulan Daerah	1) Peningkatan Kualitas Kegiatan Promosi Investasi di Tingkat Propinsi dan Nasional; 2) Penyempurnaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; 3) Percepatan Penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi.
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1) Peningkatan Profesionalisme SDM atau Petugas Layanan Pelayanan Penanaman Modal; 2) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana yang Memadai dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal; 3) Penyempurnaan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal; 4) Optimalisasi Pemeliharaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Infomasi Pelayanan Publik (SIPP) baik Elektronik maupun Non Elektronik; 5) Peningkatan Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan Penanaman Modal; 6) Penyusunan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik

Target Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Target Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGETKINERJA
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 4,80 Trilyun
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	91,50 %

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, maka telah mengusulkan beberapa Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Adapun Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada tahun Anggaran 2024:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**, yang terdiri dari:
 - 1) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan;
 - 2) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan;
 - 3) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** yang terdiri dari 7 Sub Kegiatan;
 - 4) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan;
 - 5) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan;
 - 6) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan;
2. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** terdiri dari 1 Kegiatan, dengan 1 Sub Kegiatan;
3. **Program Promosi Penanaman Modal** terdiri dari 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan;
4. **Program Pelayanan Penanaman Modal** terdiri dari 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan;
5. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** terdiri dari 1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan;
6. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** terdiri dari 1

Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan;

Guna memaksimalkan pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024, maka telah mengusulkan perubahan anggaran pada beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 9.485.000.000,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2024 seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan yang Diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.925.000.000
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
2.18.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000
2.18.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.535.000.000
2.18.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.500.000.000
2.18.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.000.000
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.815.000.000
2.18.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000
2.18.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000
2.18.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	350.000.000
2.18.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	550.000.000
2.18.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000
2.18.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000
2.18.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	800.000.000
2.18.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	200.000.000
2.18.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
2.18.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000
2.18.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.075.000.000
2.18.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000
2.18.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000
2.18.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.000.000

2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.000.000
2.18.01.2.09.01	Sub Kegiatan Pemeliharaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000
2.18.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000
2.18.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
2.18.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	50.000.000
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	50.000.000
2.18.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	50.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100.000.000
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000
2.18.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	850.000.000
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	850.000.000
2.18.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	850.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	460.000.000
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	460.000.000
2.18.05.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60.000.000
2.18.05.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300.000.000
2.18.05.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.000.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000
2.18.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000
JUMLAH		9.485.000.000

Program-Program tersebut merupakan Program-Program yang nantinya dilaksanakan oleh bidang-bidang yang terdapat dalam struktur nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan Tingkat Capaian Kinerja apakah Tingkat Capaian Kinerja tersebut sesuai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan atau tidak. Adapun indikator masing-masing Program dan Kegiatan (Belanja Langsung) yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Program dan Kegiatan yang Diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2024

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	TARGET KINERJA
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	97,00 %
1.1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun</i>	<i>12 Dokumen</i>
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen
1.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Disusun	8 Dokumen
1.2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Administrasi Keuangan yang Disusun</i>	<i>12 Laporan</i>
1.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Dikoordinasikan/ Disusun	12 Laporan
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	12 Bulan
1.3	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>%</i>
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Jenis
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75.000 Lbr
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	TARGET KINERJA
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Komponen
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan
1.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pelaksanaan Rapat di Dalam Daerah maupun Luar Daerah	12 Bulan
1.3.7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	42 Jenis
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Perkantoran yang Disediakan	300 OB
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun	3 Dokumen
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas dan Komputer yang Dipelihara	132 Jenis
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhab	6 Paket
1.5.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhab	143 Unit
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun	4 Dokumen
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan	2 Jenis
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	89 Jenis
1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Diadakan	1 Gedung
1.6.4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Diadakan	6 Jenis

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	TARGET KINERJA
2.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KESESUAIAN PENYELESAIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SESUAI DENGAN SOP	96,00 %
2.1	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan SOP</i>	<i>6.250 Dokumen</i>
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Waktu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	12 Bulan
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	96,50 %
3.1	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>12 Bulan</i>
3.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Waktu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	12 Bulan
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROSENTASE MINAT PENANAMAN MODAL	7,50 %
4.1	<i>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota yang dibuat</i>	<i>1 Dokumen</i>
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota yang Disediakan	1 Dokumen
5.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN	5,00 %
5.1	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan</i>	<i>2 Kegiatan</i>
5.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	2 Kegiatan

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT	TARGET KINERJA
6.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN	70,00 %
6.1	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Cakupan Pengendalian Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	70,00%
6.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Dilaksanakan	216 Lokasi
6.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimbingan Teknis Penanaman Modal yang Dilaksanakan	1 Kegiatan
6.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 Kali

Adapun target capaian indikator Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021- 2026 khusus Bidang Urusan Penanaman Modal, sebagai berikut.

Tabel 3.6
Target Capaian Indikator RKPD Tahun 2024 (RPJMD Tahun 2021-2026)

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024 (%)
PENANAMAN MODAL				
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	%	7,50
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	%	96,00

3.5 Dana Indikatif dan Sumbernya

Dana indikatif keseluruhan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta keseluruhan anggaran bagi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 9.485.000.000,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) secara keseluruhan anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan durasi 1 (satu) Tahun Anggaran, serta memuat Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi berdasarkan urusan yang menjadi Kewenangan Daerah, yakni Urusan Penanaman Modal. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, ini juga memuat sasaran strategis, indikator sasaran, target hasil dan keluaran yang akan dicapai dan dapat diukur kinerjanya serta sumber dana dan rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh Sumber Daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui komitmen dan nilai kebersamaan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, mampu mengelola Program dan Kegiatan di Tahun Anggaran 2024 dengan baik sehingga berdampak langsung secara signifikan terhadap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan juga sebagai pengarah bagi semua unsur kekuatan dan faktor penentu keberhasilan untuk mewujudkan strategi yang paling tepat dalam mencapai tujuan dan strategis penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi di Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 juga diharapkan sebagai panduan untuk menggerakkan seluruh kebijakan yang diambil guna mencapai target-target kinerja sasaran strategis didasarkan sumber daya yang tersedia sehingga target-target tersebut dapat tercapai sebagaimana yang ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan berdampak langsung peningkatan capaian kinerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi setiap Tahun Anggaran. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 ini, dapat disusun tepat waktu, dengan harapan ada masukan atau saran dari semua pihak yang terkait demi kesempurnaannya.

Banyuwangi, 8 Maret 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



PARTANA, S.AP., M.Si.

Pembina

NIP. 19720120 199403 1 004